KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /B.03/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-318/PK/PK.5/2023 Tanggal 12 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/088/Keuda tanggal 4 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada tanggal 29 - 1 - 2024.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 115 /B.03/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Mengingat:	1. ..... 2. ..... 3. ..... Dst.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);	Konsideran Mengingat tambahkan 4 (empat) dasar hukum yang baru yang berkenaan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.	Batang Tubuh	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. ..... 2. ..... 3. ..... Dst. 16. ~~Pekon adalah Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.~~ ~~76. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak, berupa bunga yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak~~ ~~77. Pengurangan Pajak adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak.~~ ~~78. Keringanan Pajak adalah pengurangan terhadap beban tanggungan pajak.~~ Pasal 2 (1) Jenis Pajak terdiri atas : a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas; 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. ~~(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan i dipungut oleh daerah.~~ (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh daerah.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. ..... 2. ..... 3. ..... Dst. 16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 76. dihapus 77. dihapus 78. dihapus Pasal 2 (1) Jenis Pajak terdiri atas : a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas; 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. (2) dihapus (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh daerah.	Pasal 1 : a. angka 16 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 b. angka 76 pengertiannya telah tercantum dalam ketentuan batang tubuh raperda c. angka 77, angka 78 tidak tercantum dalam ketentuan batang tubuh, mengingat pengertian yang tercantum dalam pasal 1 dipakai berulang-ulang pada pasal-pasal selanjutnya. Pasal 2 a. ayat (1) huruf g dihapus b. ayat (2) dihapus mengingat pengaturan yang sama telah tercantum pada ayat (3) sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pasal 4 (1) ..... (2) ..... (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. ..... f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan; g. ..... h. ..... i.	Pasal 4 (1) ..... (2) ..... (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. ..... f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara; g. ..... h. ..... i.	Pasal 4 ayat (3) huruf f disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2022
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Pasal 6 (1) Dasar Pengenanaan PBB-P2 merupakan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 ~~di 1 (satu) wilayah Kabupaten~~, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ~~paling cepat~~ setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah ~~daerah~~. (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. (7) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati~~.	Pasal 6 (1) Dasar Pengenanaan PBB-P2 merupakan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.	Pasal 6 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 6 dan ayat (7) UU No. 1 Tahun 20222.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.	Wilayah Pemungutan Pajak	Pasal 9 (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) ~~Wilayah pemungutan~~ PBB-P2 ~~yang~~ terutang ~~merupakan~~ wilayah Daerah yang meliputi Objek PBB-P2. (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berada pada; a. perairan darat serta bangunan diatasnya; dan b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan dengan Bangunan yang berada di daratan. Pasal 10 (1) Objek BPHTB adalah ~~Perolehan~~ Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemindahan hak karena: 1. Jual beli; 2. Tukar menukar; 3. Hibah; 4. Hibah wasiat; 5. Waris; 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. Penunjukkan pembeli dalam lelang; 9. Pelakanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Penggabungan usaha; 11. Peleburan usaha; 12. Pemekaran usaha; atau 13. Hadiah; b. Pemberian hak baru karena: 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau 2. Di luar pelepasan hak	Pasal 9 (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) PBB-P2 terutang <u>dipungut di</u> wilayah Daerah yang meliputi Objek PBB-P2. (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berada pada; a. <u>laut pedalaman dan</u> perairan darat serta Bangunan diatasnya; dan b. Bangunan yang berada di luar <u>laut pedalaman dan</u> perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, <u>kecuali pipa dan kabel bawah laut.</u> Pasal 10 (1) Objek BPHTB adalah <u>perolehan</u> Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemindahan hak karena: 1. Jual beli; 2. Tukar menukar; 3. Hibah; 4. Hibah wasiat; 5. Waris; 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. Penunjukkan pembeli dalam lelang; 9. Pelakanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Penggabungan usaha; 11. Peleburan usaha; 12. Pemekaran usaha; atau 13. Hadiah; <u>dan</u> b. Pemberian hak baru karena: 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau 2. Di luar pelepasan hak.	Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 35 Tahun 2023. Pasal 10 disempurnakan dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6) yang mengatur kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Hak milik; b. Hak guna usaha; c. Hak guna bangunan; d. Hak pakai; e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan f. Hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ~~antara lain~~: a. Untuk kantor ~~Pemerintah Pusat~~, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan Lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untik pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; d. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Hak milik; b. Hak guna usaha; c. Hak guna bangunan; d. Hak pakai; e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan f. Hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. Untuk kantor <u>pemerintah pusat</u>, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan Lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untik pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; d. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) <u>Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</u> (6) <u>Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</u>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pasal 12 (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Harga transaksi untuk jual beli; b. Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukkan pembeli dalam lelang. (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan ~~PBB-P2~~ pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam ~~PBB-P2~~ pada tahun terjadinya perolehan hak. (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah ~~Daerah tempat terutangnya BPHTB~~. (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ~~1° (satu derajat) ke atas atau 1° (satu derajat)~~ ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 12 (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi. (2) ..... (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak. (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah. (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 12 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pasal 16 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib: a. meminta bukti pembayaran BPTHB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan ~~akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah~~ paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Kepala Kantor membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 16 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib: a. meminta bukti pembayaran BPTHB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) ..... (3) ..... (4) ..... (5)	Pasal 16 ayat (1) huruf b disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.
5.	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	Pasal 19 (1) Penjualan dan/atau penyerahan ~~makanan dan/atau minuman~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi ~~makanan dan/atau minuman~~ yang disediakan oleh : a. ~~restoran~~ yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian ~~makanan dan/atau minuman~~ berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;	Pasal 19 (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh : a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;	Pasal 19 disempurnakan dengan menambahkan 1 (satu) huruf baru pada ayat (2) yaitu huruf d sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan ~~makanan dan/atau minuman , antara lain:~~ a. dengan peredaran usaha/ penghasilan tidak melebihi batas sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual ~~makanan dan/atau minuman~~; c. dilakukan oleh pabrik ~~makanan dan/atau minuman~~. Pasal 25 (1) ..... (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah. (3) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. Pasal 26 (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:	2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan peredaran usaha/ penghasilan tidak melebihi batas sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. Pasal 25 (1) ..... (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah. (4) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. Pasal 26 (1)	Pasal 25 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) yang mengatur dasar pengenaan PBJT dalam hal pembayaran menggunakan voucer sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023. Pasal 26 ayat (4) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. (2) Nilai jual tenaga listrik yang diterapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan: a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar. (3) Nilai jual tenaga listrik yang diterapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah. (4) ~~Berdasarkan~~ nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (~~4~~) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.	(2) ..... (3) ..... (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.	.
		Pasal 36 (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.	Pasal 36 (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) ..... (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.	Pasal 36 ayat (5) diubah sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (5) ~~Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur~~.		
6.	Opsen PKB	Pasal 44 ~~Objek Opsen PKB adalah PKB Terutang~~.	Pasal 44 Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.	Pasal 44 diubah sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023
		Pasal 45 (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB. (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB. ~~(3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.~~ (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.	Pasal 45 (1) ..... (2) ..... (3) Dihapus. (4)	Pasal 45 ayat (3) dihapus karena bukan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.
		Pasal 47 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 47 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.	Pasal 47 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf UU No. 1 Tahun 2022.
		Pasal 49 Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang	Pasal 49 Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB	Pasal 49 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.
		Pasal 50 (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB. (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.	Pasal 50 (1) ..... (2) ..... (3) Dihapus. (4)	Pasal 50 ayat (3) dihapus karena bukan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		~~(3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.~~ (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB. Pasal 52 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 52 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.	Pasal 52 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2022.
7.	Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah ditentukan	Pasal 55 (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan saran transportasi umum. (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum. (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum. (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi ~~namun tidak terbatas pada~~: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah.	Pasal 55 (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah.	Pasal 56 ayat (4) disempurnakan sesuai ketentuan pasal 25 ayat (5) PP No. 23 Tahun 2023.
8.	Retribusi Jasa Umum	Pasal 57 (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:	Pasal 57 (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:	Pasal 57 disempurnakan dengan menambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), serta ayat

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		a. pelayanan Kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan pasar. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan : (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. ~~(7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.~~	a. pelayanan Kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan pasar. (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. (10) Dihapus.	(7) dihapus sesuai ketentuan Pasal 27 PP No. 35 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9.	Pelayanan Kebersihan	Pasal 59 (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat penampungan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemprosesan akhir sampah. c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemprosesan akhir sampah; d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social dan ~~tempat umum lainnya~~. Pasal 62 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan: b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.	Pasal 59 (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat penampungan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemprosesan akhir sampah. c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemprosesan akhir sampah; d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social dan ..... Pasal 62 (1) ..... (2) ..... (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.	Pasal 59 diubah sesuai ketentuan Pasal 29 PP Nomor 35 Tahun 2023. Dalam rangka memberikan akuntabilitas, kepastian dan transparansi atau kejelasan kepada Wajib Retribusi, jenis pelayanan kebersihan pada tempat umum lainnya yang dikecualikan atau tidak dipungut retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda. Pasal 62 tambahkan ayat (3) baru sesuai ketentuan Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
10.	Tarif Retribusi	Pasal 63 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya ~~operasi~~ dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.	Pasal 63 (1) ..... (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal (3) ..... (4)	Pasal 63 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 33 PP No. 35 Tahun 2023.
11.	Retribusi Jasa Usaha	Pasal 65 (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta. (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. ~~(8) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.~~	Pasal 65 (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.	Pasal 65: a. ayat (4) disempurnakan. b. Tambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6). c. Ayat (8) dihapus. Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 25, Pasal 88 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022, dan Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2023.. Apabila penyelenggaraan BLUD memerlukan penyesuaian pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, dapat diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			(8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. (10) Dihapus.	
		Pasal 72 Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.	Pasal 72 (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. Kerja sama pemanfaatan; c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau d. Kerja sama penyediaan imfrastruktur. (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah. (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.	Pasal 72 rumusan normanya diubah berdasarkan tabulasi sesuai ketentuan Pasal 58 PP No. 35 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pasal 73 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya; b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan; c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa; d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan; e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; f. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan g. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.	Pasal 73 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan; c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan; e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; f. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.	Pasal 73 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Pasal 75 (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi. (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 75 (1) ..... (2) ..... (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau d. kerja sama penyediaan infrastruktur. tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini. (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah. (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah. (8) ..... (9) ..... (10)	Pasal 75 diubah dengan menambahkan 5 (lima) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), dan Ayat (12) PP No. 35 Tahun 2023. a. Penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha harus memperhatikan aspek kemudahan berusaha iklim investasi, serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. b. Struktur dan Besaran Tarif pelayanan yang dilakukan oleh BLUD, ditetapkan dalam Perda dan apabila dilakukan peninjauan kembali, penambahan pelayanan yang merupakan detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Usaha yang telah diatur dalam Perda, dan/atau penambahan pemanfaatan aset BMD dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati c. Tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan ketentuan: 1. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa; 2. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan 4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
12.	Retribusi Perizinan Tertentu	Pasal 76 (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi: a. persetujuan bangunan gedung; dan b. penggunaan tenaga kerja asing. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu. (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu. (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. Pasal 77 (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~adalah~~ bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.	Pasal 76 (1) ..... (2) ..... (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. (4) ..... (5) ..... (6) ..... Pasal 77 (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.	Pasal 76 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) yang mengatur pengecualian objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023. Pasal 77 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 46 PP No. 35 Tahun 2023 dan PP No. 16 Tahun 2021.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Pasal 78 (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan ~~sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing~~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	Pasal 78 (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	Pasal 78 diubah sesuai ketentuan Pasal 47 PP No. 35 Tahun 2023 dan PP No. 34 Tahun 2021.
		Pasal 79 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaran jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. pelayanan ~~persetujuan bangunan gedung~~ diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan: b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan. (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. formula untuk bangunan gedung, meliputi: 1. luas total lantai; 2. indeks terintegrasi; dan 3. indeks bangunan gedung terbangun. b. formula untuk prasana bangunan gedung, meliputi: 1. volume; 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan 3. indeks bangunan gedung terbangun.	Pasal 79 (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaran jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan: b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan. (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: 1. luas total lantai; 2. indeks lokalitas; 3. indeks terintegrasi; dan 4. indeks bangunan gedung terbangun. b. formula untuk prasana bangunan gedung, meliputi: 1. volume; 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan 3. indeks bangunan gedung terbangun.	Pasal 79: a. ayat (2) frasa "'persetujuan bangunan gedung" diubah menjaid PBG sesuai ketentuan Pasal 1 Raperda. b. ayat (3) disempurnakan dengan menambahkan frasa "yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan" dan untuk formula Bangunan Gedung agar ditambahkan "Indeks Lokalitas" sesuai ketentuan PP No. 16 Tahun 2021.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Pasal 80 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup ~~Sebagian atau seluruh~~ biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. (3) Pelayanan ~~persetujuan bangunan gedung~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada ~~rincian layanan sebagaimana diatur dalam~~ peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung. (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaran pemberian izin memperhatikan pada ~~rincian layanan sebagaimana diatur dalam~~ peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.	Pasal 80 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung. (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaran pemberian izin memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.	Pasal 80 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 49 PP No. 35 Tahun 2023. dan Pemda memilih salah satu, antara "sebagian" atau "seluruh" dalam prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.
		Pasal 81 (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang. (3) ..... (4) ..... (5) .....Dst (9)	Pasal 81 (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi. (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG. (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung. (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang. (5) ..... (6) .....Dst (11)	Pasal 81 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur cara perhitungan pajak khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Pasal ... (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahan pejak terutang. (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. Pasal ... (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa pajak. (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (@0 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah setiap SPTPD. (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar .... (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami kahar *(force majeure).* (7) Kriteria keadaan kahar *(force majeure)* sebagaiman dimasud pada ayat (6) meliputi: a. ..... b. ..... c. .....Dst.	Setelah Pasal 85 tambahkan 3 (tiga) Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 95 UU No. 1 Tahun 2022 serta Pasal 58, Pasal 59, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 PP No. 35 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Pasal ... (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengaturan mengenai: a. Pendaftaran dan pendataan; b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. Pembayaran dan penyetoran; d. Pelaporan; e. Pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan; f. Pemeriksaan pajak; g. Penagihan Pajak dan Retribusi; h. Keberatan; i. Gugatan; j. Penghapusan piutang pajak dan Retribusi oleh Gubernur; dan k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi. (4) Dalam hal system pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.	
		Pasal 86 sampai dengan Pasal 89	Dihapus	
13.	Sanksi Pidana	Pasal 95 ~~(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.~~ ~~(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.~~	Pasal 95 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam denagn pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Pasal 95 diubah sesuai ketentuan Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pasal 97 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan ~~paling lama 3 (tiga) bulan~~ atau pidana denda ~~paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar~~.	Pasal 97 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Pasal 97 diubah sesuai ketentuan Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023.
		Pasal 100 (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak atau retribusi. ~~(2) Besaran sanksi administratif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas Jumlah pajak yang kurang dibayar.~~ ~~(3) Besaran sanksi administratif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah retribusi yang kurang dibayar.~~ (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 100 (1) ..... (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.	Pasal 100 diubah dengan menghapus ayat (2) dan Ayat (3) serta ayat (4) disempurnakan sesuai ketentuan PP No. 25 Tahun 2023

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr>
<td>1.

2.</td>
<td>
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN
1) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
I. PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

a. pelayanan rawat jalan tanpa tindakan
<table>
<tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>~~SARANA (Rp)~~</th><th>~~JASA LAYANAN (Rp)~~</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Poliklinik Umum</td><td>~~6.500~~</td><td>~~3.500~~</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Poliklinik Gigi</td><td>~~6.500~~</td><td>~~3.500~~</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Poliklinik KIA</td><td>~~6.500~~</td><td>~~3.500~~</td><td>10.000</td></tr>
</table>
</td>
<td>
a. pelayanan rawat jalan tanpa tindakan
<table>
<tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>Dihapus</th><th>Dihapus</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Poliklinik Umum</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Poliklinik Gigi</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Poliklinik KIA</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td><td>10.000</td></tr>
</table>
</td>
<td>
Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023.

Sebaiknya hanya jumlah atau tarif total saja yang dicantumkan sehingga komponen pembentuk biaya (Sarana dan Jasa Layanan) direkomendasikan dihapus. Rekomendasi ini berlaku untuk tabel-tabel yang lain
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>b. tarif keur kesehatan
<table>
<tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>~~SARANA (Rp)~~</th><th>~~JASA LAYANAN (Rp)~~</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Masuk Sekolah</td><td>~~3.250~~</td><td>~~1.750~~</td><td>5.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Melamar Pekerjaan</td><td>~~6.500~~</td><td>~~3.500~~</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pencalonan Kepala desa / Perangkat desa</td><td>~~32.500~~</td><td>~~17.500~~</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kepentingan Asuransi dan Lain lain</td><td>~~19.500~~</td><td>~~10.500~~</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>~~Surat Keterangan Cuti Hamil~~</td><td>~~13.000~~</td><td>~~7.000~~</td><td>~~20.000~~</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pemeriksaan calon Jemaah haji</td><td>~~32.500~~</td><td>~~17.500~~</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td>7</td><td>~~Penataran / Pendidikan Pelatihan/ Tugas Belajar/ Izin Belajar / CPNS~~</td><td>~~13.000~~</td><td>~~7.000~~</td><td>~~20.000~~</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Anak Sekolah Untuk Kegiatan extra Kurikuler</td><td>~~3.250~~</td><td>~~1.750~~</td><td>5.000</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Calon Pengantin</td><td>~~9.750~~</td><td>~~5.250~~</td><td>15.000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>~~Biaya Legalisir Surat Keterangan per lembar~~</td><td>~~1.000~~</td><td></td><td>~~1.000~~</td></tr>
<tr><td>11</td><td>~~Surat Keterangan Sakit~~</td><td colspan="3">~~di Bebankan Pada Biaya Administrasi~~</td></tr>
</table>
</td>
<td>Dihapus.</td>
<td>Pelayanan administrasi bukan termasuk pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4
4.	II. TARIF RAWAT INAP **NO** | **JENIS PELAYANAN** | ~~**SARANA (Rp)**~~ | ~~**JASA LAYANAN (Rp)**~~ | **JUMLAH (Rp)** 1 | Paket Rawat inap/Hari | ~~32.500~~ | ~~17.500~~ | 50.000 2 | Visite Dokter Umum | ~~13.000~~ | ~~7.000~~ | 20.000 3 | Visite Dokter Spesialis | ~~26.000~~ | ~~14.000~~ | 40.000 4 | Asuhan Keperawatan | ~~10.500~~ | ~~19.500~~ | 30.000 5 | ~~Biyaya~~ Makan Perhari | ~~32.500~~ | ~~17.500~~ | 50.000 6 | ~~Rekam Medik~~ | ~~6.500~~ | ~~3.500~~ | ~~10.000~~	II. TARIF RAWAT INAP NO | JENIS PELAYANAN | Dihapus | Dihapus | JUMLAH (Rp) 1 | Paket Rawat inap/Hari | Dihapus | Dihapus | 50.000 2 | Visite Dokter Umum | Dihapus | Dihapus | 20.000 3 | Visite Dokter Spesialis | Dihapus | Dihapus | 40.000 4 | Asuhan Keperawatan | Dihapus | Dihapus | 30.000 5 | Biaya Makan Perhari | Dihapus | Dihapus | 50.000 6 | Dihapus | Dihapus | Dihapus | Dihapus	
5.	V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 1. tarif pelayanan keluarga berencana **NO** | **JENIS PELAYANAN** | ~~**SARANA (Rp)**~~ | ~~**JASA LAYANAN (Rp)**~~ | **JUMLAH (Rp)** 1 | Pelayanan Calon Penganten | ~~13.000~~ | ~~7.000~~ | 20.000 2 | Pemasangan IUD (Intra Uterine Device) | ~~39.000~~ | ~~21.000~~ | 60.000 3 | Kontrol IUD (Intra Uterine Device) | ~~8.450~~ | ~~4.550~~ | 13.000 4 | Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) | ~~8.450~~ | ~~4.550~~ | 13.000 5 | Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit | ~~25.350~~ | ~~13.650~~ | 39.000 6 | Pemasangan Susuk | ~~113.750~~ | ~~61.250~~ | 175.000 7 | Pelepasan Susuk KB | ~~23.400~~ | ~~12.600~~ | 36.000 8 | Suntik KB (Keluarga Berencana) | - | - | - | a) 1 Bulan | ~~19.500~~ | ~~10.500~~ | 30.000 | b) 3 Bulan | ~~13.000~~ | ~~7.000~~ | 20.000 9 | Pil KB (Keluarga Berencana) | - | - | - | a) Mini Pil | ~~2.275~~ | ~~1.225~~ | 3.500 | b) Kombinasi | ~~3.250~~ | ~~1.750~~ | 5.000	V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 1. tarif pelayanan keluarga berencana **NO** | **JENIS PELAYANAN** | Dihapus | Dihapus | **JUMLAH (Rp)** 1 | Pelayanan Kesehatan Calon Penganten | Dihapus | Dihapus | 20.000 2 | Pemasangan IUD (Intra Uterine Device) | Dihapus | Dihapus | 60.000 3 | Kontrol IUD (Intra Uterine Device) | Dihapus | Dihapus | 13.000 4 | Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) | Dihapus | Dihapus | 13.000 5 | Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit | Dihapus | Dihapus | 39.000 6 | Pemasangan Susuk | Dihapus | Dihapus | 175.000 7 | Pelepasan Susuk KB | Dihapus | Dihapus | 36.000 8 | Suntik KB (Keluarga Berencana) | - | - | - | a) 1 Bulan | Dihapus | Dihapus | 30.000 | b) 3 Bulan | Dihapus | Dihapus | 20.000 9 | Pil KB (Keluarga Berencana) | - | - | - | a) Mini Pil | Dihapus | Dihapus | 3.500 | b) Kombinasi | Dihapus | Dihapus | 5.000	Jenis pelayanan pada pelayanan keluarga berencana Nomor 1. 'Pelayanan Calon Penganten' perlu diperjelas secara spesifik jenis pelayanan yang diberikan.

1	2	3	4
6.	2. tarif pelayanan kesehatan ibu hamil **NO** | **JENIS PELAYANAN** | ~~**SARANA (Rp)**~~ | ~~**JASA LAYANAN (Rp)**~~ | **JUMLAH (Rp)** 1 | Pemeriksaan Ibu Hamil ANC | ~~3.250~~ | ~~1.750~~ | 5.000 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas | ~~3.250~~ | ~~1.750~~ | 5.000 3 | Pelayanan Kesehatan Neonatus | ~~3.250~~ | ~~1.750~~ | 5.000 4 | Pelayanan Kesehatan Bayi | ~~3.250~~ | ~~1.750~~ | 5.000	2. tarif pelayanan kesehatan ibu hamil **NO** | **JENIS PELAYANAN** | Dihapus | Dihapus | **JUMLAH (Rp)** 1 | Pemeriksaan Ibu Hamil ANC | Dihapus | Dihapus | 5.000 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas | Dihapus | Dihapus | 5.000 3 | Pelayanan Kesehatan Neonatus | Dihapus | Dihapus | 5.000 4 | Pelayanan Kesehatan Bayi | Dihapus | Dihapus | 5.000	
7.	3. Tarif pelayanan persalinan dan tindakan persalinan **NO** | **JENIS PELAYANAN** | ~~**SARANA (Rp)**~~ | ~~**JASA LAYANAN (Rp)**~~ | **JUMLAH (Rp)** 1 | Partus Normal | ~~455.000~~ | ~~245.000~~ | 700.000 2 | Partus dengan Penyulit | ~~585.000~~ | ~~315.000~~ | 900.000 3 | Partus Gemelli/ Kembar | ~~780.000~~ | ~~420.000~~ | 1.200.000 4 | Jahitan Perineum derajat 1,2 | ~~36.400~~ | ~~19.600~~ | 56.000 5 | Jahitan Perenium derajat 3 | ~~45.500~~ | ~~24.500~~ | 70.000 6 | Jahitan Porcio | ~~44.200~~ | ~~23.800~~ | 68.000 7 | Oksigenasi 30 Menit Pertama | ~~16.250~~ | ~~8.750~~ | 25.000 8 | Oksigentasi tiap 30 menit Berikutnya | ~~6.500~~ | ~~3.500~~ | 10.000 9 | Evakuasi plasenta manual | ~~65.000~~ | ~~35.000~~ | 100.000 10 | eksplorasi | ~~32.500~~ | ~~17.500~~ | 50.000 11 | Penanganan Perdarahan dengan Kondom kateter | ~~48.750~~ | ~~26.250~~ | 75.000	. 3. Tarif pelayanan persalinan dan tindakan persalinan **NO** | **JENIS PELAYANAN** | Dihapus | Dihapus | **JUMLAH (Rp)** 1 | Partus Normal | Dihapus | Dihapus | 700.000 2 | Partus dengan Penyulit | Dihapus | Dihapus | 900.000 3 | Partus Gemelli/ Kembar | Dihapus | Dihapus | 1.200.000 4 | Jahitan Perineum derajat 1,2 | Dihapus | Dihapus | 56.000 5 | Jahitan Perenium derajat 3 | Dihapus | Dihapus | 70.000 6 | Jahitan Porcio | Dihapus | Dihapus | 68.000 7 | Oksigenasi 30 Menit Pertama | Dihapus | Dihapus | 25.000 8 | Oksigentasi tiap 30 menit Berikutnya | Dihapus | Dihapus | 10.000 9 | Evakuasi plasenta manual | Dihapus | Dihapus | 100.000 10 | eksplorasi | Dihapus | Dihapus | 50.000 11 | Penanganan Perdarahan dengan Kondom kateter | Dihapus | Dihapus | 75.000	

1	2	3	4
8.	4. Tarif rawat Inap Ibu dan Bayi Pasca Persalinan **NO** / **JENIS PELAYANAN** / ~~**SARANA (Rp)**~~ / ~~**JASA LAYANAN (Rp)**~~ / **JUMLAH (Rp)** 1 / Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari / ~~39.000~~ / ~~21.000~~ / 60.000 2 / Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari / ~~52.000~~ / ~~28.000~~ / 80.000 3 / Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari / ~~39.000~~ / ~~21.000~~ / 60.000 4 / Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari / ~~52.000~~ / ~~28.000~~ / 80.000	4. Tarif rawat Inap Ibu dan Bayi Pasca Persalinan **NO** / **JENIS PELAYANAN** / Dihapus / Dihapus / **JUMLAH (Rp)** 1 / Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari / Dihapus / Dihapus / 60.000 2 / Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari / Dihapus / Dihapus / 80.000 3 / Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari / Dihapus / Dihapus / 60.000 4 / Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari / Dihapus / Dihapus / 80.000	
9.	5. Tarif Tindakan Lain lain Pada Ibu dan Anak **NO** / **JENIS PELAYANAN** / ~~**SARANA (Rp)**~~ / ~~**JASA LAYANAN (Rp)**~~ / **JUMLAH (Rp)** 1 / Pengambilan Spesimen Pap Smear / ~~9.750~~ / ~~5.250~~ / 15.000 2 / Pemeriksaan IVA(Inspekulo Visual Asam Asetat) / ~~16.500~~ / ~~8.885~~ / 25.385 3 / Tindik Telinga Bayi / ~~9.750~~ / ~~5.250~~ / 15.000 4 / Pijit bayi / ~~9.750~~ / ~~5.250~~ / 15.000 5 / Pijit Oksitoksin / ~~9.750~~ / ~~5.250~~ / 15.000	5. Tarif Tindakan Lain lain Pada Ibu dan Anak **NO** / **JENIS PELAYANAN** / Dihapus / Dihapus / **JUMLAH (Rp)** 1 / Pengambilan Spesimen Pap Smear / Dihapus / Dihapus / 15.000 2 / Pemeriksaan IVA(Inspekulo Visual Asam Asetat) / Dihapus / Dihapus / 25.385 3 / Tindik Telinga Bayi / Dihapus / Dihapus / 15.000 4 / Pijit bayi / Dihapus / Dihapus / 15.000 5 / Pijit Oksitoksin / Dihapus / Dihapus / 15.000	

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>XIII. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN DAN JENAZAH
<table>
<tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>SARANA (Rp)</th><th>JASA LAYANAN (Rp)</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pelayanan Ambulans</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Sampai dengan 10 KM</td><td>81.250</td><td>43.750</td><td>125.000</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Setiap Kilometer berikutnya</td><td>6.500</td><td>3.500</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Jasa Pendamping Rujukan (Perawat, Bidan)</td><td></td><td>75.000</td><td>75.000</td></tr>
</table>
</td>
<td rowspan="2">Disempurnakan.</td>
<td rowspan="2">Dalam hal pelayanan mobil Ambulan tidak disertai layanan Kesehatan di dalamnya maka pelayanan mobil ambulan dicantumkan ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>XIV. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN
<table>
<tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>SARANA (Rp)</th><th>JASA LAYANAN (Rp)</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)</td><td>16.250</td><td>8.750</td><td>25.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pelayanan Kesehatan tradisional</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Herbal</td><td>6.500</td><td>3.500</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelayanan Akupressur</td><td>13.000</td><td>7.000</td><td>20.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pelayanan Terapi Krio IVA Positif</td><td>97.500</td><td>52.500</td><td>150.000</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4
12.	2) STRUKTUR DAN BESARAN TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN PRINGSEWU	2) STRUKTUR DAN BESARAN TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN PRINGSEWU	Diubah dengan menghapus huruf A dan Huruf B serta mereposisi huruf C ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	~~TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN~~		
1	~~Praktik Klinik /Praktik Kerja Lapangan / Kepaniteraan~~		-
	~~a. Setingkat SMA / SMK~~	~~Per orang / hari~~	~~3.000~~
	~~b. DI, D2 dan DIII~~	~~Per orang / hari~~	~~5.000~~
	~~c. DIV & S1~~	~~Per orang / hari~~	~~10.000~~
	~~d. S1 Profesi~~	~~Per orang / hari~~	~~20.000~~
	~~e. S2 Profesi~~	~~Per orang / hari~~	~~35.000~~
	~~g. S2 Non Profesi~~	~~Per orang / hari~~	~~37.000~~
2	~~Orientasi Mahasiswa~~	~~Per Kelompok~~	~~75.000~~
3	~~Narasumber Mahasiswa Praktek~~	~~Per narasumber~~	~~120.000~~
4	~~Pelatihan, Job Training / Magang Pegawai~~		-
	~~a. Setingkat SLTA D I~~	~~Per orang / hari~~	~~25.000~~
	~~b. DIII~~	~~Per orang / hari~~	~~35.000~~
	~~c. DIV & S1~~	~~Per orang / hari~~	~~45.000~~
	~~d. S1 Profesi~~	~~Per orang / hari~~	~~60.000~~
5	~~Ujian Praktek Akhir Program Keperawatan dan Kebidanan~~		-
	~~a. DI, D2 dan DIII~~	~~Per orang~~	~~60.000~~
	~~b. DIV & S1~~	~~Per orang~~	~~75.000~~
	~~c. S1 Profesi~~	~~Per orang~~	~~90.000~~
6	~~Study Banding~~		-
	~~a. Study Banding~~	~~Per orang / Bagian~~	~~150.000~~
	~~b. Pembuatan Materi~~	~~Per Materi~~	~~150.000~~
	~~c. Nara Sumber~~		-
	~~1) S3~~	~~Per orang / Jam~~	~~125.000~~
	~~2) S2~~	~~Per orang / Jam~~	~~115.000~~

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	Dihapus		
1	Dihapus		-
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
2	Dihapus	Dihapus	Dihapus
3	Dihapus	Dihapus	Dihapus
4	Dihapus		-
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
5	Dihapus		-
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
6	Dihapus		
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus		
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus		
	Dihapus	Dihapus	Dihapus

1	2			3				4
	~~3) S 1~~	~~Per orang / Jam~~	~~75.000~~		Dihapus	Dihapus	Dihapus	
	~~c. Moderator~~			7	Dihapus		-	
	~~1) S2~~	~~Per orang~~	~~150.000~~		Dihapus	Dihapus	Dihapus	
	~~2) S 1~~	~~Per orang~~	~~100.000~~		Dihapus	Dihapus	Dihapus	
7	~~Penelitian~~		-		Dihapus	Dihapus	Dihapus	
	~~a. DIII~~	~~Per Proposal~~	~~100.000~~		Dihapus	Dihapus	Dihapus	
	~~c. DIV~~	~~Per Proposal~~	~~120.000~~		Dihapus	Dihapus	Dihapus	
	~~c. S1~~	~~Per Proposal~~	~~140.000~~		Dihapus	Dihapus	Dihapus	
	~~d. S2i~~	~~Per Proposal~~	~~180.000~~	B	Dihapus	Dihapus	Dihapus	
	~~e. S3~~	~~Per Proposal~~	~~250.000~~	C	Direposisi.			
	~~g. Lembaga Lain~~	~~Per Proposal~~	~~400.000~~	1	Aula Untuk Mahasiswa	Per 3 Jam	150.000	
B	~~Pengambilan data Rekam Medik~~	~~per 100 BRM~~	~~50. 000~~		lebih jam berikutnya	per 1 jam	75.000	
C	~~Tarif Penggunaan Ruangan Penunjang Kegiatan~~			2	Aula Untuk Non Mahasiswa	Per 3 Jam	250.000	
1	Aula Untuk Mahasiswa	Per 3 Jam	150.000		lebih jam berikutnya	per 1 jam	100.000	
	lebih jam berikutnya	per 1 jam	75.000	3	ATM	Per Tahun/ 3 M	5.000.000	
2	Aula Untuk Non Mahasiswa	Per 3 Jam	250.000	4	Fotocopy	Per hari / M2	5.000	
	lebih jam berikutnya	per 1 jam	100.000	5	Kantin	Per hari M2	5.000	
3	ATM	Per Tahun/ 3 M	5.000.000					
4	Fotocopy	Per hari / M2	5.000					
5	Kantin	Per hari M2	5.000					

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td></td><td>3) Tarif Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Tarif Pelayanan Medis
A. RAWAT JALAN
2. TMNO Klinik Spesialistik (Per Tindakan)
<table><tr><th>No</th><th>Kelompok</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Kecil</td><td>Rp 170.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Sedang</td><td>Rp 340.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Besar</td><td>Rp 455.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Khusus I</td><td>Rp 978.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Khusus II</td><td>Rp 1.165.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Khusus III</td><td>Rp 1.387.000</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td></td><td>Disempurnakan.</td><td>Layanan Kesehatan TMNO klinik spesialistik pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022. Pemda perlu merinci (keterangan di luar tabel) tindakan apa saja yang menjadi komponen kelompok Khusus Kecil. Besar, Khusus I, Khusus II dan Khusus III</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>3. TMNO Klinik Gigi Spesialis (Per Tindakan)
<table><tr><th>No</th><th>Kelompok</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Kecil</td><td>Rp 171.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Sedang</td><td>Rp 486.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Besar</td><td>Rp 864.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Khusus I</td><td>Rp 1.203.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Khusus II</td><td>Rp 1.606.500</td></tr><tr><td>6</td><td>Khusus III</td><td>Rp 1.995.000</td></tr></table></td><td>Disempurnakan.</td><td>Layanan Kesehatan TMNO klinik Gigi Spesialis pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>4. TMNO Klinik Umum (Per Tindakan)
<table><tr><th>No</th><th>Kelompok</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Kecil</td><td>Rp 33.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Sedang</td><td>Rp 49.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Besar</td><td>Rp 85.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Khusus I</td><td>Rp 138.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Khusus II</td><td>Rp 165.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Khusus III</td><td>Rp 195.000</td></tr></table></td><td>Disempurnakan.</td><td>Layanan Kesehatan TMNO klinik Umum pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>17.</td><td>5. TMNO Klinik Gigi Mulut Umum (Per Tindakan)
<table><tr><th>No</th><th>Kelompok</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Kecil</td><td>Rp 57.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Sedang</td><td>Rp 162.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Besar</td><td>Rp 288.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Khusus I</td><td>Rp 401.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Khusus II</td><td>Rp 535.500</td></tr><tr><td>6</td><td>Khusus III</td><td>Rp 665.000</td></tr></table></td><td>Disempurnakan.</td><td>Layanan Kesehatan TMNO Gigi Mulut Umum pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>6. TMNO Klinik Khusus Hemodialisa (Per Tindakan)
<table><tr><th>No.</th><th>Nama Tindakan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Hemodialisa Single Use</td><td>Rp 1.037.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Hemodialisa Re-use</td><td>Rp 911.000</td></tr><tr><td>3</td><td>CDL</td><td>Rp 700.000</td></tr></table></td><td>Disempurnakan.</td><td>Layanan Kesehatan TMNO Klinik Khusus Hemodialisa (Per Tindakan) pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>7. TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI (per Tindakan)
<table><tr><th>No</th><th>Kelompok Tindakan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Kecil</td><td>Rp 15.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Sedang</td><td>Rp 30.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Besar</td><td>Rp 55.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Khusus I</td><td>Rp 90.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Khusus II</td><td>Rp 135.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Khusus III</td><td>Rp 190.000</td></tr></table></td><td>Disempurnakan.</td><td>Layanan Kesehatan Tindakan Keperawatan/ Kebidanan Mandiri (Per Tindakan) pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>9. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan (Per Tindakan)
<table><tr><th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas</td><td>Rp 95.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Visum Et Repertum Kekerasan Fisik</td><td>Rp 95.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Visum Et Repertum Kekerasan Seksual</td><td>Rp 125.000</td></tr><tr><td>4</td><td>~~Pelayanan Medis Asuransi~~</td><td>~~Rp 45.000~~</td></tr><tr><td>5</td><td>~~Penerbitan Surat Keterangan Sehat~~</td><td>~~Rp 45.000~~</td></tr><tr><td>6</td><td>~~Penerbitan Surat Keterangan Medis~~</td><td>~~Rp 45.000~~</td></tr></table></td><td>9. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan (Per Tindakan)
<table><tr><th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas</td><td>Rp 95.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Visum Et Repertum Kekerasan Fisik</td><td>Rp 95.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Visum Et Repertum Kekerasan Seksual</td><td>Rp 125.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td></tr><tr><td>5</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td></tr><tr><td>6</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td></tr></table></td><td>Nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 dihapus sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023 karena pelayanan administrasi merupakan hal yang dikecualikan dalam layanan kesehatan.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>21.</td><td>10. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan (Per Kunjungan / Tindakan)
<table><tr><th>No</th><th>Klinik</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Konseling Rawat Jalan</td><td>Rp 38.000</td></tr><tr><td>2</td><td><s>Interpretasi dan PIO Resep</s></td><td><s>Rp 2.000</s></td></tr><tr><td>3</td><td><s>Tuslah Farmasi Non Racikan /R</s></td><td><s>Rp 1.500</s></td></tr><tr><td>4</td><td><s>Tuslah Farmasi Racikan /R</s></td><td><s>Rp 2.000</s></td></tr></table></td><td>10. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan (Per Kunjungan / Tindakan)
<table><tr><th>No</th><th>Klinik</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Konseling Rawat Jalan</td><td>Rp 38.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td></tr><tr><td>3</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td></tr><tr><td>4</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td></tr></table></td><td>Angka 2, angka 3 dan nagka 4 dihapus karena bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan.</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>11. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan (Per Kunjungan)
<table><tr><th>No</th><th>Klinik</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Konseling Gizi</td><td>Rp 38.000</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>12. Pelayanan Paket Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)
<table><tr><th>No</th><th>Jenis Pemeriksaan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi</td><td>Rp 38.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemeriksaan Dokter Spesialis</td><td>Rp 61.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Thorax PA</td><td>Rp 131.500</td></tr><tr><td>4</td><td>EKG</td><td>Rp 85.000</td></tr><tr><td>5</td><td>USG Kebidanan dan Penyakit Dalam</td><td>Rp 170.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Audiometri</td><td>Rp 127.500</td></tr><tr><td>7</td><td>Tonometri</td><td>Rp 85.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Spirometry</td><td>Rp 212.500</td></tr><tr><td>9</td><td>Pemeriksaan visus</td><td>Rp 50.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Pemeriksaan Buta Warna</td><td>Rp 50.000</td></tr><tr><td>11</td><td>MMPI</td><td>Rp 250.000</td></tr><tr><td>12</td><td>Treadmil</td><td>Rp 425.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Laboratorium:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>▯ Darah Lengkap (DL)</td><td>Rp 51.000</td></tr><tr><td></td><td>▯ Urine Lengkap</td><td>Rp 42.500</td></tr><tr><td></td><td>▯ GDP</td><td>Rp 25.500</td></tr><tr><td></td><td>▯ GD2JPP</td><td>Rp 25.500</td></tr></table></td><td><table><tr><th>No</th><th>Jenis Pemeriksaan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>14</td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td></tr></table></td><td>Nomor 14 dihapus sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023 karena pelayanan administrasi merupakan hal yang dikecualikan dalam layanan kesehatan.</td></tr>
</table>

1	2			3	4
		Ureum	Rp 29.750		
		Kreatinin	Rp 29.750		
		Asam Urat	Rp 25.500		
		Cholesterol Total	Rp 34.000		
		Trigliseride	Rp 34.000		
		SGOT	Rp 29.750		
		SGPT	Rp 29.750		
		HDL Cholesterol	Rp 59.500		
		LDL Cholesterol	Rp 21.240		
		Alkhali Phospatase	Rp 42.500		
		HBsAg	Rp 42.500		
		Bilirubin Total	Rp 68.000		
		Bilirubin Direk	Rp 34.000		
		Bilirubin Indirek	Rp 34.000		
		Protein Total	Rp 17.000		
		Albumin	Rp 68.000		
		Tes Narkoba	Rp 144.500		
	13	Asuhan Keperawatan MCU	Rp 8.000		
	14	~~Cetak Hasil MCU~~	~~Rp 15.000~~		
24.	B. RAWAT INAP 1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap (Per Hari) **No / Kelas / Tarif** 1 ~~Kelas III/II/I~~ ~~Rp 95.000~~ 2 ~~Kelas VIP/VVIP~~ ~~Rp 119.000~~			B. RAWAT INAP **No / Jenis Pelayanan / Tarif** 1 Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap (Per Hari) Rp .... 2 Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan) Rp .... 3 Visite Dokter Jaga Rawat Inap tanpa permintaan (per kunjungan) Dst	Penetapan tarif untuk pelayanan dokter pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang sama seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan kualifikasi dokter/perawat (misal dr. spesialis, dr. umum, perawat, dsbnya) dan berdasarkan sarana dan prasarana kamar rawat inap yang disediakan.
25.	2. Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan) **No / Kelas / Tarif** 1 ~~Kelas III/II/I~~ ~~Rp 47.500~~ 2 ~~Kelas VIP/VVIP~~ ~~Rp 60.000~~ **) Visite Dokter Jaga Dilakukan Pada Seat Jam Jaga (Diluar Jam Kerja) Atas Indikasi Medis bila Diperlukan.*				

1	2	3	4
26.	3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap tanpa permintaan (per kunjungan) **No** | **Kelas** | **Tarif** 1 | ~~Kelas III/II/I~~ | ~~Rp 4.000~~ 2 | ~~Kelas VIP/AA/IP~~ | ~~Rp 5.000~~		
27.	4. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus (Per Hari) **No** | **Kelas / Ruang** | **Tarif** 1 | ~~Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke~~ | ~~Rp 130.000~~ 2 | ~~HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~ | ~~Rp 170.000~~		
28.	5. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus dengan permintaan (Per Kunjungan) **No** | **Kelas / Ruang** | **Tarif** 1 | ~~Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke~~ | ~~Rp 65.000~~ 2 | ~~HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~ | ~~Rp 85.000~~ **) Visite Dokter Jaga Dilakukan Pada Saat Jam Jaga (Diluar Jam Kerja) Atas Indikasi Medis bila diperlukan*		
29.	6. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus tanpa permintaan (per kunjungan) **No** | **Kelas / Ruang** | **Tarif** 1 | ~~Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke~~ | ~~Rp 6.000~~ 2 | ~~HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~ | ~~Rp 7.000~~		
30.	7. Konsultasi Dokter Rawat Inap (per hari) **No** | **Jenis Layanan** | **Tarif** 1 | ~~Konsultasi Spesialis By Phone~~ | ~~Rp 50.000~~ 2 | ~~Konsultasi Spesialis On Call~~ | ~~Rp 95.000~~ 3 | ~~Tindakan Konsul Dokter Jaga~~ | ~~Rp 21.000~~		

1	2	3	4
31.	8. Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien) **No** | **Kelas** | **Tarif** 1 | ~~Kelas III/II/I~~ | ~~**Rp 95.000**~~ 2 | ~~Kelas VIP/VVIP~~ | ~~**Rp 119.000**~~	1. Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien) **No** | **Kelas** | **Tarif** 1 | Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien) | Rp ..... 2 | Pelayanan Case Manager Rawat Inap Khusus (Per Pasien) | Rp ..... 3 | TMNO Rawat Inap (Per Tindakan) | Rp ..... 4 | TMNO Rawat Inap Khusus (Per Tindakan) | Rp	
32.	9. Pelayanan Case Manager Rawat Inap Khusus (Per Pasien) **No** | **Ruang** | **Tarif** 1 | ~~Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke~~ | ~~**Rp 130.000**~~ 2 | ~~HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~ | ~~**Rp 170.000**~~		
33.	10. TMNO Rawat Inap (Per Tindakan) **No** | **Kelompok** | **Kelas** | **Tarif** 1 | ~~Kecil~~ | ~~1. Kelas III/II/I~~ | ~~**Rp 65.000**~~ 2 | ~~Kecil~~ | ~~2. Kelas VIP/VVIP~~ | ~~**Rp 93.000**~~ - | - | - 3 | ~~Sedang~~ | ~~1. Kelas III/II/I~~ | ~~**Rp 96.000**~~ 4 | ~~Sedang~~ | ~~2. Kelas VIP/VVIP~~ | ~~**Rp 139.000**~~ - | - | - 5 | ~~Besar~~ | ~~1. Kelas III/II/I~~ | ~~**Rp 128.000**~~ 6 | ~~Besar~~ | ~~2. Kelas VIP/VVIP~~ | ~~**Rp 185.000**~~ - | - | - 7 | ~~Khusus I~~ | ~~1. Kelas III/II/I~~ | ~~**Rp 262.000**~~ 8 | ~~Khusus I~~ | ~~2. Kelas VIP/VVIP~~ | ~~**Rp 380.000**~~ - | - | - 9 | ~~Khusus II~~ | ~~1. Kelas III/II/I~~ | ~~**Rp 337.000**~~ 10 | ~~Khusus II~~ | ~~2. Kelas VIP/VVIP~~ | ~~**Rp 483.000**~~ - | - | - 11 | ~~Khusus III~~ | ~~1. Kelas III/II/I~~ | ~~**Rp 416.000**~~ 12 | ~~Khusus III~~ | ~~2. Kelas VIP/VVIP~~ | ~~**Rp 605.000**~~		

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>11. TMNO Rawat Inap Khusus (Per Tindakan)
<table>
<tr><th>No</th><th>Kelompok</th><th>Kelas / Ruang</th><th>Tarif</th></tr>
<tr><td>1</td><td>~~Kecil~~</td><td>~~1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke~~</td><td>~~Rp 83.000~~</td></tr>
<tr><td>2</td><td>~~Kecil~~</td><td>~~2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~</td><td>~~Rp 94.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>~~Sedang~~</td><td>~~1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke~~</td><td>~~Rp 124.000~~</td></tr>
<tr><td>4</td><td>~~Sedang~~</td><td>~~2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~</td><td>~~Rp 140.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>~~Besar~~</td><td>~~1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke~~</td><td>~~Rp 305.000~~</td></tr>
<tr><td>6</td><td>~~Besar~~</td><td>~~2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~</td><td>~~Rp 344.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>~~Khusus I~~</td><td>~~1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke~~</td><td>~~Rp 487.000~~</td></tr>
<tr><td>8</td><td>~~Khusus I~~</td><td>~~2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~</td><td>~~Rp 549.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>~~Khusus II~~</td><td>~~1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke~~</td><td>~~Rp 754.000~~</td></tr>
<tr><td>10</td><td>~~Khusus II~~</td><td>~~2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~</td><td>~~Rp 847.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>~~Khusus III~~</td><td>~~1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke~~</td><td>~~Rp 911.000~~</td></tr>
<tr><td>12</td><td>~~Khusus III~~</td><td>~~2. HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU~~</td><td>~~Rp 1.020.000~~</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35.</td>
<td>12. TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI (Per Tindakan)
<table>
<tr><th>No</th><th>Kelompok Tindakan</th><th>Tarif</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kecil</td><td>Rp 15.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sedang</td><td>Rp 30.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Besar</td><td>Rp 55.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Khusus I</td><td>Rp 90.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Khusus II</td><td>Rp 135.000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Khusus III</td><td>Rp 190.000</td></tr>
</table>
</td>
<td>Disempurnakan.</td>
<td>Layanan Kesehatan Tindakan Keperawatan/ Kebidanan Mandiri (Per Tindakan) pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4
36.	13. ASKEP Rawat Inap (Per Hari) **No** / **Kelas** / **Tarif** 1 / Kelas III/II/I / **Rp 51.000** 2 / Kelas VIP/VVIP / **Rp 64.000**	13. ASKEP Rawat Inap (Per Hari) **No** / **Kelas** / **Tarif** 1 / ASKEP Rawat Inap (Per Hari) / Rp .... 2 / ASKEP Rawat Inap Khusus (Per Hari) / Rp	
37.	14. ASKEP Rawat Inap Khusus (Per Hari) **No** / **Kelas / Ruang** / **Tarif** 1 / Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke / **Rp 70.500** 2 / HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU / **Rp 102.000**		
38.	15. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap (Per Tindakan) **No** / **Jenis Pelayanan** / **Tarif** 1 / Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas / **Rp 95.000** 2 / Visum Et Repertum Kekerasan Fisik / **Rp 95.000** 3 / Visum Et Repertum Kekerasan Seksual / **Rp 125.000** 4 / Pelayanan Medis Asuransi / **Rp 45.000** 5 / ~~Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran~~ / **Rp 45.000** 6 / ~~Penerbitan Surat Keterangan Medis~~ / **Rp 45.000**	15. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap (Per Tindakan) **No** / **Jenis Pelayanan** / **Tarif** 1 / Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas / **Rp 95.000** 2 / Visum Et Repertum Kekerasan Fisik / **Rp 95.000** 3 / Visum Et Repertum Kekerasan Seksual / **Rp 125.000** 4 / Pelayanan Medis Asuransi / **Rp 45.000** 5 / Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran / **Rp 45.000** 6 / Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis / **Rp 45.000**	a. Apabila visum et Repertum dilakukan atas permintaan Aparat Penegak Hukum/ APH sebagai tindak lanjut untuk kepentingan perkara pidana, maka biaya visum dapat dibebankan kepada negara dalam hal ini kepada institusi APH yang bersangkutan. b. Rincian pelayanan terkait Penerbitan Surat Keterangan Sehat dan Medis (angka 5 dan 6) diubah dengan mencantumkan frasa Pemeriksaan Untuk.
39.	16. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap (Per Hari) **No** / **Kelas** / **Tarif** 1 / ~~Kelas III/II/I~~ / ~~**Rp 17.500**~~ 2 / ~~Kelas VIP/VVIP~~ / ~~**Rp 22.000**~~	16. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap (Per Hari) **No** / **Jenis Pelayanan** / **Tarif** 1 / Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap (Per Hari) / Rp ..... 2 / Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan (Per Tindakan) / Rp	Poin 17 dikapitalisasi dalam harga obat.

1	2	3	4
40.	17. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan (Per Tindakan) **No** | **Klinik** | **Tarif** 1 | ~~Interpretasi dan PIO Resep~~ | ~~**Rp 2.000**~~ 2 | ~~Tuslah Farmasi Non Racikan /R~~ | ~~**Rp 1.500**~~ 3 | ~~Tuslah Farmasi Racikan /R~~ | ~~**Rp 2.000**~~		
41.	18. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap (Per Hari) **No** | **Kelas** | **Tarif** 1 | Kelas III/II/I | **Rp 24.000** 2 | Kelas VIP/VVIP | **Rp 30.000**	18. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap (Per Hari) **No** | **Kelas** | **Tarif** 1 | Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap (Per Hari) | Rp 	
42.	B. RAWAT DARURAT 4. Pelayanan Medikolegal IGD/PONEK (Per Tindakan) **No** | **Jenis Pelayanan** | **Tarif** 1 | Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas | **Rp 95.000** 2 | Visum Et Repertum Kekerasan Fisik | **Rp 95.000** 3 | Pelayanan Medis Asuransi | **Rp 45.000**	Dihapus.	Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.
43.	D. KAMAR OPERASI (OK) 1. TMO NU Tanpa Pendampingan (Per Tindakan) **No** | **Kelompok** | **Kelas** | **Tarif** 1 | Kecil | Kelas III/II/I | **Rp 3.149.000** 2 | Kecil | Kelas VIP/VVIP | **Rp 3.936.000** | | | 3 | Sedang | Kelas III/II/I | **Rp 3.968.000** 4 | Sedang | Kelas VIP/VVIP | **Rp 5.356.000** 5 | Besar | Kelas III/II/I | **Rp 5.184.000** 6 | Besar | Kelas VIP/VVIP | **Rp 7.996.000** | | |		a. Penetapan tarif untuk pelayanan dokter pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang sama seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Permenkes No. 85 Tahun 2015. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan kualifikasi dokter/perawat (mis. dr. spesialis, dr. umum, perawat, dsbnya) dan berdasarkan jasa sarana dan prasarana kamar rawat inap yang disediakan. b. Dalam rangka memberikan akuntabilitas, kejelasan dan kepastian

1	2			3	4
	7	Khusus I	Kelas III/II/I	**Rp 7.560.000**	kepada Wajib Retribusi, Pemda perlu merinci tindakan apa saja yang menjadi komponen kelompok Kecil, Besar, Khusus I, Khusus II dan Khusus II
	8	Khusus I	Kelas VIP/VVIP	**Rp 9.987.000**	
	9	Khusus II	Kelas III/II/I	**Rp 9.720.000**	
	10	Khusus II	Kelas VIP/VVIP	**Rp 12.730.000**	
	11.	Khusus III	Kelas III/II/I	**Rp 12.437.000**	
	12.	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	**Rp 15.919.000**	

2. **TMO NU Dengan Pendampingan (Per Tindakan)**

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/II/I	Rp 3.282.000
2	Kecil	Kelas VIP/VVIP	Rp 4.090.000
3	Sedang	Kelas III/II/I	Rp 4.218.000
4	Sedang	Kelas VIP/VVIP	Rp 5.693.000
5	Besar	Kelas III/II/I	Rp 5.521.000
6	Besar	Kelas VIP/VVIP	Rp 8.383.000
7	Khusus I	Kelas III/II/I	Rp 8.089.000
8	Khusus I	Kelas VIP/VVIP	Rp 10.596.000
9	Khusus II	Kelas III/II/I	Rp 10.420.000
10	Khusus II	Kelas VIP/VVIP	Rp 13.535.000
11	Khusus III	Kelas III/II/I	Rp 13.369.000
12	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	Rp 17.033.000

1	2	3	4
	3. TMO NU Cito Tanpa Pendampingan (Per Tindakan)		

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/II/I	Rp 3.482.000
2	Kecil	Kelas VIP/VVIP	Rp 4.319.000
3	Sedang	Kelas III/II/I	Rp 4.599.000
4	Sedang	Kelas VIP/VVIP	Rp 6.207.000
5	Besar	Kelas III/II/I	Rp 6.027.000
6	Besar	Kelas VIP/VVIP	Rp 8.965.000
7	Khusus I	Kelas III/II/I	Rp 8.883.000
8	Khusu I	Kelas VIP/VVIP	Rp 11.509.000
9	Khusus II	Kelas III/II/I	Rp 11.470.000
10	Khusus II	Kelas VIP/VVIP	Rp 14.742.000
11	Khusus III	Kelas III/II/I	Rp 14.737.000
12	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	Rp 18.864.000

44. 4. TMO NU Cito Dengan Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/II/I	Rp 3.648.000
2	Kecil	Kelas VIP/VVIP	Rp 4.511.000
3	Sedang	Kelas III/II/I	Rp 4.912.000
4	Sedang	Kelas VIP/VVIP	Rp 6.630.000
5	Besar	Kelas III/II/I	Rp 6.448.000
6	Besar	Kelas VIP/VVIP	Rp 9.449.000
7	Khusus 1	Kelas III/II/I	Rp 9.545.000
8	Khusus I	Kelas VIP/VVIP	Rp 12.269.000
9	Khusus II	Kelas III/II/I	Rp 12.345.000
10	Khusus II	Kelas VIP/VVIP	Rp 15.748.000
11	Khusus III	Kelas III/II/I	Rp 15.882.000
12	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	Rp 20.328.000

1	2	3	4
45.	5. **TMO ODS Bius Lokal (Per Tindakan)** **No** / **Kelompok** / **Kelas** / **Tarif** 1 / Kecil / Kelas III/II/I / **Rp 1.575.000** 2 / Kecil / Kelas VIP/VVIP / **Rp 1.968.000** 3 / Sedang / Kelas III/II/I / **Rp 1.984.000** 4 / Sedang / Kelas VIP/VVIP / **Rp 2.678.000** 5 / Besar / Kelas III/II/I / **Rp 2.592.000** 6 / Besar / Kelas VIP/VVIP / **Rp 3.998.000** 7 / Khusus I / Kelas III/II/I / **Rp 3.780.000** 8 / Khusus I / Kelas VIP/VVIP / **Rp 4.993.000** 9 / Khusus II / Kelas III/II/I / **Rp 4.860.000** 10 / Khusus III / Kelas VIP/VVIP / **Rp 6.365.000** 11 / Khusus III / Kelas III/II/I / **Rp 7.218.000** 12 / Khusus III / Kelas VIP/VVIP / **Rp 7.959.000**		
46.	6. ASKEP Kamar Operasi (Per Tindakan) **No** / **Jenis ASKEP** / **Tarif** 1 / Askep Kamar Operasi/Recovery room (RR) / **Rp 38.000**		

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr>
<td>47.</td>
<td>E. RUANG BERSALIN (VK) DAN PONEK
1. Tindakan Persalinan di VK (Per Tindakan)
<table>
<tr><th>No</th><th>Tindakan</th><th>Kelas</th><th>Tarif</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persalinan Normal</td><td>Kelas III/II/I</td><td>Rp 1.500.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Persalinan Normal</td><td>Kelas VIP/VVIP</td><td>Rp 2.495.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Persalinan Dengan Penyulit</td><td>Kelas III/II/I</td><td>Rp 1.830.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Persalinan Dengan Penyulit</td><td>Kelas VIP/VVIP</td><td>Rp 3.045.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Manual Plasenta</td><td>Kelas III/II/I</td><td>Rp 600.000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Manual Plasenta</td><td>Kelas VIP/VVIP</td><td>Rp 775.000</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Kuretage</td><td>Kelas III/II/I</td><td>Rp 1.955.000</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Kuretage</td><td>Kelas VIP/VVIP</td><td>Rp 2.385.000</td></tr>
</table></td>
<td></td>
<td>Penetapan tarif untuk pelayanan dokter pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang sama seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Permenkes No. 85 Tahun 2015. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan kualifikasi dokter/perawat (mis. dr. spesialis, dr. umum, perawat, dsbnya) dan berdasarkan sarana dan prasarana kamar rawat inap yang disediakan.</td>
</tr>
<tr>
<td>48.</td>
<td>H. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH (PER TINDAKAN)
<table>
<tr><th colspan="3">Tarif Dasar (TD)</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Nama Tindakan</th><th>TD per 10 KM</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Antar Pasien</td><td>Rp 65.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Antar Jenazah</td><td>Rp 60.000</td></tr>
</table>
• Jarak < 10 km dikenakan tarif dasar sama dengan 10 km
<table>
<tr><th colspan="3">Tarif Tambahan (TT) Per KM</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Nama Tindakan</th><th>TT per KM</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Antar Pasien</td><td>Rp 6.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Antar Jenazah</td><td>Rp 6.000</td></tr>
</table>
• Jarak < 10 km dikenakan tarif tambahan sama dengan 10 km</td>
<td></td>
<td>Dalam hal pelayanan mobil Ambulan tidak disertai layanan kesehatan didalamnya maka pelayanan mobil ambulan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td>49.</td>
<td>I. DOKUMEN REKAM MEDIS (PER KUNJUNGAN)
<table>
<tr><th>No</th><th>Klinik</th><th>Tarif</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Jalan Baru</td><td>Rp 15.000</td></tr>
</table></td>
<td>Dihapus</td>
<td>Pelayanan administrasi bukan termasuk pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>2</td><td>Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Jalan Lama</td><td>Rp 10.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Inap Dari Rawat Jalan</td><td>Rp 20.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya Dokumen RM Pasien IGD Baru</td><td>Rp 15.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Biaya Dokumen RM Pasien IGD Lama</td><td>Rp 10.000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Inap Dari IGD</td><td>Rp 20.000</td></tr>
</table>
TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN RSUD PRINGSEWU
A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<table>
<tr><th>No</th><th>A. Praktek Kerja Lapangan (PKL)</th><th>Tarif</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SLTA atau Sederajat</td><td>Rp 5.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DI - DIII atau Sederajat</td><td>Rp 10.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>3</td><td>D IV - SI atau Sederajat</td><td>Rp 15.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Program Profesi</td><td>Rp 35.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>5</td><td>S2 atau Sederajat</td><td>Rp 50.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>6</td><td>S3 atau Sederajat</td><td>Rp 75.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Honorarium Nara Sumber</td><td>Rp 175.000</td><td>OK</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>No</th><th>B. Magang</th><th>Tarif</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SLTA atau sederajat</td><td>Rp 30.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DI - DIII atau Sederajat</td><td>Rp 45.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>3</td><td>D IV - SI atau Sederajat</td><td>Rp 55.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Program Profesi S1</td><td>Rp 75.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td>5</td><td>S2 atau Sederajat</td><td>Rp 80.000</td><td>OH</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>No</th><th>C. Orientasi Mahasiswa</th><th>Tarif</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Orientasi Mahasiswa Per Kelompok</td><td>Rp 130.000</td><td>KLP</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>No</th><th>D. Ujian Kasus/UAP di Ruang Perawatan</th><th>Tarif</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SLTA atau Sederajat</td><td>Rp 70.000</td><td>OJ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DI - DIII atau Sederajat</td><td>Rp 100.000</td><td>OJ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>D IV - SI atau Sederajat</td><td>Rp 110.000</td><td>OJ</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Program Profesi</td><td>Rp 120.000</td><td>OJ</td></tr>
<tr><td>5</td><td>S2 atau Sederajat</td><td>Rp 130.000</td><td>OJ</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>50.</td><td></td><td>Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.</td><td>Bukan merupakan objek pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2023.</td></tr>
</table>

1	2	3	4
51.	B. PENELITIAN **No. a. DI – DIII** | **Tarif** | **Ket** 1 Awal – Akhir | Rp 250.000 | OP 2 Pengambilan Data Awal | Rp 55.000 | OK 3 Uji kuisioner | Rp 55.000 | OK 4 Penelitian | Rp 175.000 | OK **No. b. DIV – SI atau Sederjat** 1 Awal – Akhir | Rp 400.000 | OP 2 Pengambilan Data Awal | Rp 90.000 | OK 3 Uji Kuesioner | Rp 90.000 | OK 4 Penelitian | Rp 225.000 | OK **No. c. S2 atau Sederajat** 1 Awal – Akhir | Rp 550.000 | OP 2 Pengambilan Data Awal | Rp 175.000 | OK 3 Uji Kuesioner | Rp 175.000 | OK 4 Penelitian | Rp 315.000 | OK	Dihapus.	Bukan merupakan objek pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2023.
52.	C. KUNJUNGAN STUDI BANDING **No** | **Jumlah Rombongan** | **Tarif** | **Ket** 1 Biaya Kunjungan | Rp 250.000 | OK 2 Pembuatan Materi | Rp 125.000 | OM 3 Honor Narasumber S3 | Rp 150.000 | OK 4 Honor Narasumber S2 | Rp 125.000 | OK 5 Honor Narasumber S1 | Rp 100.000 | OK 6 Honor Moderator S2 | Rp 175.000 | OK 7 Honor Moderator S1 | Rp 115.000 | OK	Dihapus.	Bukan merupakan objek pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2023.
53.	D. SEWA **No** | **Jenis Sewa** | **Tarif *)** | **Ket** 1 Sewa Auditorium **) | Rp 1.200.000 | PK 2 Sewa Ruang Aula untuk | Rp 300.000 | Per 3 jam 3 mahasiswa | Rp 100.000 | Per 1 jam	Direposisi.	Disarankan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.

1	2	3	4
	Lebih jam berikutnya		
4	Sewa Ruang Aula untuk non mahasiswa	Rp 400.000	Per 3 jam
5	Lebih jam berikutnya	Rp 150.000	Per 1 jam
6	Sewa Galery ATM Per Tahun	Rp 15.000.000	3 M² per tahun
7	Sewa Kantin Per Tahun	Rp 5.500.000	3 M² per tahun
8	Sewa Minimarket	Rp 800.000	1 M² per tahun
9	Sewa Tempat Usaha Fotokopi	Rp 6.000.000	3 M² per tahun

F. PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS

No	Pelayanan	Tarif	Ket
1	Pengolahan Sampah Medis Padat	Rp 20.000	Kilogram

54. Direposisi. Dipindahkan ke penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

G. LEGALISIR SURAT DINAS

No	Pelayanan	Tarif	Ket
1	Legalisir Surat Dinas Per Lembar	Rp 1.000	Lembar

55. Dihapus. Pelayanan administrasi bukan termasuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

Catatan dan Keterangan:

OH : Orang Hari *PK : Per Kegiatan*
OJ : Orang Judul *PH : Per Hari*
OP : Orang Paket *PB : Per Bulan*
OK : Orang Kegiatan ***) : Dikecualikan untuk kegiatan sosial dan kedinasan*

4) Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
I	II	III
V.	**TARIF PELAYANAN LAIN LAIN**	
	~~A. PENDIDIKAN~~	
	~~1) Praktek Klinik (Orang / Minggu)~~	
	~~• Profesi~~	~~60.000~~
	~~• Diploma Empat / Strata Satu~~	~~45.000~~
	~~• Diploma Tiga~~	~~40.000~~
	~~2) Praktek Non Klinik (Orang / Minggu)~~	
	~~• Profesi~~	~~50.000~~
	~~• Diploma Empat / Strata Satu~~	~~35.000~~
	~~• Diploma Tiga~~	~~25.000~~

56.

4) Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
I	II	III
V.	**TARIF PELAYANAN LAIN LAIN**	
	A. Dihapus.	

Pelayanan Lain-lain untuk huruf A. Pendidikan, D. Studi Banding dan E. Penelitian dihapus karena bukan objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>B. KONSULTASI</td><td>15.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Dokter Spesialis</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Dokter Umum</td><td>25.000</td></tr>
<tr><td></td><td>C. PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>• Pengambilan Sampel Kurang dari 10KM</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Pengambilan Sampel Setiap Kelipatan 10KM</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Inspeksi Sanitasi</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td></td><td>~~D. STUDI BANDING~~</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>~~• Institusi diluar Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu~~</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>~~• Pembekalan / orang / hari~~</td><td>~~200.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~• Sarana Prasarana / hari~~</td><td>~~200.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~• Institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu~~</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>~~• Pembekalan / orang / hari~~</td><td>~~200.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~• Sarana Prasarana~~</td><td>~~150.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~E. PENELITIAN~~</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>~~• Peresponden~~</td><td>~~25.000~~</td></tr>
<tr><td></td><td>F. MEDICAL CEK UP</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>• Paket Sederhana</td><td>160.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Darah Lengkap</td><td>65.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Urine Lengkap</td><td>40.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• GDS</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Consul Dokter</td><td>25.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Paket Lengkap</td><td>340.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Darah Lengkap</td><td>65.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Urine Lengkap</td><td>40.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• GDS</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Cholestrol Total</td><td>35.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Cholesterol Direct</td><td>40.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Trigliseride</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Ureum</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Creatinine</td><td>30.000</td></tr>
</table>
C. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis</th><th>Tarif retribusi per setiap kali parkir</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kendaraan Roda Dua</td><td>Rp 2.000,-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kendaraan Roda Empat</td><td>Rp 3.000,-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kendaraan Roda Enam atau lebih</td><td>Rp 4.000,-</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>B. KONSULTASI</td><td>15.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Dokter Spesialis</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Dokter Umum</td><td>25.000</td></tr>
<tr><td></td><td>C. PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>• Pengambilan Sampel Kurang dari 10KM</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Pengambilan Sampel Setiap Kelipatan 10KM</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Inspeksi Sanitasi</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td></td><td>D. Dihapus.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>E. Dihapus.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>F. MEDICAL CEK UP</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>• Paket Sederhana</td><td>160.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Darah Lengkap</td><td>65.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Urine Lengkap</td><td>40.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• GDS</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Consul Dokter</td><td>25.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Paket Lengkap</td><td>340.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Darah Lengkap</td><td>65.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Urine Lengkap</td><td>40.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• GDS</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Cholestrol Total</td><td>35.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Cholesterol Direct</td><td>40.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Trigliseride</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Ureum</td><td>30.000</td></tr>
<tr><td></td><td>• Creatinine</td><td>30.000</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Pemda direkomendasikan untuk memberikan maksimal waktu parkir untuk memberi kepastian kepada penerima layanan/Wajib Retribusi dan tetap menjaga ketertiban pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>58.</td><td>LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>59.</td><td>C. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</td><td>Disempurnakan.</td><td>Perlu ditambahkan objek dan tarif yang ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.</td></tr>
<tr><td>60.</td><td>D. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak:
<table><tr><th>JENIS PELAYANAN</th><th>JENIS HEWAN</th><th>TARIF</th></tr><tr><td rowspan="3">Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong</td><td>A. Sapi/Kerbau/ Kuda</td><td>Rp. 55.000,-/ekor</td></tr><tr><td>B. Kambing / Domba</td><td>Rp. 25.000,-/ekor</td></tr><tr><td>C. Unggas</td><td>Rp. 200,-/ekor</td></tr></table></td><td>D. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak:
<table><tr><th>JENIS PELAYANAN</th><th>JENIS HEWAN</th><th>TARIF</th></tr><tr><td rowspan="3">Pemotongan Hewan Ternak termasuk pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong</td><td>A. Sapi/Kerbau/ Kuda</td><td>Rp. 55.000,-/ekor</td></tr><tr><td>B. Kambing / Domba</td><td>Rp. 25.000,-/ekor</td></tr><tr><td>C. Unggas</td><td>Rp. 200,-/ekor</td></tr></table></td><td>Jenis pelayanan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>61.</td><td>E. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
<table>
<tr><th>Tempat</th><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Lapangan Indoor Gedung Olahraga Mini</td><td>Siang (07.00 – 18.00)</td><td>Rp. 25.000 / Jam</td></tr>
<tr><td>Malam (18.00 – 22.00)</td><td>Rp. 35.000 / Jam</td></tr>
<tr><td>Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 1x Dalam 1 Minggu (2 jam)</td><td></td></tr>
<tr><td>Siang (07.00 – 18.00)</td><td>Rp. 150.000 / Bulan</td></tr>
<tr><td>Malam (18.00 – 22.00)</td><td>Rp. 200.000 / Bulan</td></tr>
<tr><td>Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 2x Dalam 1 Minggu (2 jam)</td><td></td></tr>
<tr><td>Siang (07.00 – 18.00)</td><td>Rp. 200.000 / Bulan</td></tr>
<tr><td>Malam (18.00 – 22.00)</td><td>Rp. 250.000 / Bulan</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Gedung Olahraga Mini</td><td>Acara Resepsi, Seminar, Konser Musik, dll.</td><td>Rp. 1.500.000 / Hari</td></tr>
<tr><td>Acara Sosial dan Olahraga</td><td>Rp. 500.000 / Hari</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lapangan Tenis</td><td>Siang (07.00 – 18.00)</td><td>Rp. 20.000 / Jam</td></tr>
<tr><td>Malam(18.00 – 22.00)</td><td>Rp. 25.000 / Jam</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Lapangan Sepak Bola Kuncup</td><td>Siang (07.00 – 18.00)</td><td>Rp. 300.000 / Jam</td></tr>
<tr><td>Malam(18.00 – 22.00)</td><td>Rp. 350.000 / Jam</td></tr>
<tr><td>Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 1x Dalam 1 Minggu (1 jam)</td><td></td></tr>
<tr><td>Siang (07.00 – 18.00)</td><td>Rp. 750.000 / Bulan</td></tr>
<tr><td>Malam(18.00 – 22.00)</td><td>Rp. 1.000.000 / Bulan</td></tr>
<tr><td>Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 2x Dalam 1 Minggu (1 jam)</td><td></td></tr>
<tr><td>Siang (07.00 – 18.00)</td><td>Rp. 1.250.000 / Bulan</td></tr>
<tr><td>Malam(18.00 – 22.00)</td><td>Rp. 1.500.000 / Bulan</td></tr>
<tr><td>Event Olahraga</td><td>Rp. 500.000 / Hari</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Wisata Alam</td><td>Tiket Masuk Wisata</td><td>Rp. 3000 / Orang</td></tr>
<tr><td>Tiket Parkir</td><td>Rp. 2000 / Motor
Rp. 3000 / Mobil</td></tr>
<tr><td>Sewa Gazebo</td><td>Rp. 10.000 / Gazebo</td></tr>
<tr><td>Sewa Kios</td><td>Rp. 100.000 / Bulan</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Wisata Buatan</td><td>Tiket Masuk Wisata</td><td>Rp. 3000 / Orang</td></tr>
<tr><td>Tiket Parkir</td><td>Rp. 2000 / Motor
Rp. 3000 / Mobil</td></tr>
<tr><td>Sewa Gazebo</td><td>Rp. 10.000 / Gazebo</td></tr>
<tr><td>Sewa Kios</td><td>Rp. 100.000 / Bulan</td></tr>
</table></td><td>Disempurnakan.</td><td>Dicantumkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.</td></tr>
</table>

1	2	3	4
62.	G. Pemanfaatan Aset Daerah 2) Sewa Tanah, Lapangan, bangunan ruangan		Rincian pelayanan Sewa Tanah, Lapangan, bangunan ruangan pada: 1. Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah (poin 1). 2. Tanah Sekolah, SDN, SPMN (poin 6). 3. Tanah Kantor PerangkatDaerah(poin 7). 4. Tanah Komplek Islamic Center (poin 11). 5. Tanah Pemda Komplek Samsat Pringsewu (poin 13) yang digunakan untuk kantin, toko, fotokopi, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya direposisi menjadi objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

No	Objek Retribusi	Letak	Tarif (Rp)	Ket
1.	~~Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah~~	~~Komplek Pemerintah Daerah~~	~~5.000/m2/bln~~	~~Kantor, Kantin, Kios~~
2.	Tanah Kosong Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	500/m2/ 6 bln	pertanian
3.	Tanah	Area Pendopo	3.000/m2/bln	Koperindag
		Rest Are	3.000/m2/bln	Koperindag
4.	Jalan Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	2.000.000/ kegiatan	Event
5.	Lapangan Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	3.000.000/ kegiatan	Event
6.	~~Tanah Sekolah, SDN, SPMN~~	~~SDN, SMPN Se- Kab. Pringsewu~~	~~3.000/ m2 /Bulan~~	~~Kantin, Kios, Fotocopy dll~~
7.	~~Tanah Kantor Perangkat Daerah~~	~~Se-Kab. Pringsewu~~	~~3.000/ m2 /Bulan~~	~~Kantin, Kios, Fotocopy dll~~
8.	Bangunan Gedung	Komplek Pemda	5000/ m2 /Bulan	Bank, ATM dll
9.	Bangunan Gedung	Kios Rest Area	5000/ m2 /Bulan	Koperindag
		Panggung Hiburan Rest Area	500.000/ Hari	Koperindag
10.	Tanah/ Ladang/ Kebun	Fajar Baru	400/ m2 /Bulan	Calon Lapas
11	~~Tanah Komplek Islamic Center~~	~~Fajar Agung Barat~~	~~500/ m2 /Bulan~~	~~Kantin, Kios, Fotocopy dll~~
12	Tanah Kosong/ ladang/ Sawah	Pekon Tulung Agung	500/ m2 /Bulan	Pertanian
13	~~Tanah Pemda Komplek Samsat Pringsewu~~	~~Gumuk Mas~~	~~5000/ m2 / Bulan~~	~~Kantin, Toko, Fotocopy dll~~

No	Objek Retribusi	Letak	Tarif (Rp)	Ket
1.	Dihapus/direposisi.			
2.	Tanah Kosong Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	500/m2/ 6 bln	pertanian
3.	Tanah	Area Pendopo	3.000/m2/bln	Koperindag
		Rest Are	3.000/m2/bln	Koperindag
4.	Jalan Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	2.000.000/ kegiatan	Event
5.	Lapangan Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	3.000.000/ kegiatan	Event
6.	Dihapus/direposisi.			
7.	Dihapus/direposisi.			
8.	Bangunan Gedung	Komplek Pemda	5000/ m2 /Bulan	Bank, ATM dll
9.	Bangunan Gedung	Kios Rest Area	5000/ m2 /Bulan	Koperindag
		Panggung Hiburan Rest Area	500.000/ Hari	Koperindag
10.	Tanah/ Ladang/ Kebun	Fajar Baru	400/ m2 /Bulan	Calon Lapas
11	Dihapus/direposisi.			
12	Tanah Kosong/ ladang/ Sawah	Pekon Tulung Agung	500/ m2 /Bulan	Pertanian
13	Dihapus/direposisi.			

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>63.</td><td>4) Sewa Aset Daerah lainnya
<table>
<tr><td>1</td><td>Vidiotron</td><td>Pringsewu</td><td>10.000/30 detik</td><td>Iklan Dll</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rumah Adat</td><td>Wates & Margakarya</td><td>500.000/ Kegiatan</td><td>Event</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bus & Mikro Bus</td><td>Randis Pemda</td><td>700.000/Hari</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td><s>Ruangan Pada Mall Pelayanan</s></td><td><s>Pendopo</s></td><td><s>5.000/ m2/ Bulan</s></td><td><s>Kantin, Toko, Fotocopy dll</s></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kolam Budidaya Perikanan</td><td>Tulung Agung</td><td>5000/m2/Musim Tanam</td><td>Sewa Kolam</td></tr>
</table></td><td>4) Sewa Aset Daerah lainnya
<table>
<tr><td>1</td><td>Vidiotron</td><td>Pringsewu</td><td>10.000/30 detik</td><td>Iklan Dll</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rumah Adat</td><td>Wates & Margakarya</td><td>500.000/ Kegiatan</td><td>Event</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bus & Mikro Bus</td><td>Randis Pemda</td><td>700.000/Hari</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Dihapus/ direposisi.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kolam Budidaya Perikanan</td><td>Tulung Agung</td><td>5000/m2/Musim Tanam</td><td>Sewa Kolam</td></tr>
</table></td><td>Rincian pelayanan sewa aset daerah lainnya pada Ruangan Mall Pelayanan yang digunakan untuk kantin, toko, fotokopi, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya dihapus, namun dapat dikelompokkan menjadi objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha</td></tr>
<tr><td>64.</td><td>5) Sewa Aset Rusunawa
<table>
<tr><th>No</th><th>Lantai</th><th>Tarif Sewa</th></tr>
<tr><td>1</td><td><s>Komersial / Tempat Usaha</s></td><td><s>Rp. 500.000,- / Bulan</s></td></tr>
<tr><td>2</td><td>1</td><td>Rp. 300.000,- / Bulan</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2</td><td>Rp. 275.000,- / Bulan</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3</td><td>Rp. 250.000,- / Bulan</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4</td><td>Rp. 225.000,- / Bulan</td></tr>
<tr><td>6</td><td>5</td><td>Rp. 200.000,- / Bulan</td></tr>
</table></td><td>5) Sewa Aset Rusunawa
<table>
<tr><th>No</th><th>Lantai</th><th>Tarif Sewa</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Dihapus/ direposisi.</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>1</td><td>Rp. 300.000,- / Bulan</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2</td><td>Rp. 275.000,- / Bulan</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3</td><td>Rp. 250.000,- / Bulan</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4</td><td>Rp. 225.000,- / Bulan</td></tr>
<tr><td>6</td><td>5</td><td>Rp. 200.000,- / Bulan</td></tr>
</table></td><td>Rincian pelayanan sewa aset rusunawa yang digunakan untuk komersial/ tempat usaha dihapus, namun dapat dikelompokkan menjadi objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.</td></tr>
<tr><td>65.</td><td>6) Laboratoriun Lingkungan Hidup

a. <u>Tarif Pelaksanaan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Hidup.</u>
<table>
<tr><th colspan="2">No</th><th>Uraian</th><th>Satuan (per)</th><th>Tarif (Rp)</th></tr>
<tr><td colspan="2">A</td><td colspan="3">ANALISA AIR DAN AIR LIMBAH</td></tr>
<tr><td></td><td>I</td><td colspan="3">Fisik</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td>Daya Hantar Listrik</td><td>Sampel</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td>Kekeruhan</td><td>Sampel</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td></td><td>3.</td><td>Suhu (Air)</td><td>Sampel</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td></td><td>4.</td><td>Salinitas</td><td>Sampel</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td></td><td>5.</td><td>Warna</td><td>Sampel</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td></td><td>6.</td><td>Kecerahan</td><td>Sampel</td><td>20,000</td></tr>
</table></td><td>Disempurnakan.</td><td>Diubah satuan waktu dalam bentuk sampel, titik dan contoh menjadi pemakaian/pengujian.</td></tr>
</table>

1	2					3	4
		7.	Bau	Sampel	20,000		
		8.	Rasa	Sampel	20,000		
		9.	a. TDS: *Total Dissolved Solids* (SNI)	Sampel	50,000		
			b. TDS (Electrimetri)	Sampel	20,000		
		10.	PTT: padatan tersuspensi total	Sampel	60,000		
	II	Kimia					
		1.	pH: *potential Hydrogen*	Sampel	20,000		
		2.	a. DO: *Dissolved Oxygen*	Sampel	20,000		
			b. DO Winkler	Sampel	75,000		
		3.	BOD: *Biochemical Oxygen Demand*	Sampel	100,000		
		4.	COD: *Chemical Oxygen Demand*	Sampel	165,000		
		5.	Nitrit (NO2)	Sampel	75,000		
		6.	Nitrat (NO3)	Sampel	75,000		
		7.	Sulfat (SO4)	Sampel	75,000		
		8.	Amoniak (NH3)	Sampel	90,000		
		9.	Phospat (PO4)	Sampel	90,000		
		10.	Fenol	Sampel	90,000		
		11.	Minyak Lemak	Sampel	150,000		
		12.	MBAS/Deterjen	Sampel	90,000		
		13.	Cyanida (CN-)	Sampel	90,000		
		14.	Sulfida (H2S)	Sampel	90,000		
		15.	Chlorida (Cl-)	Sampel	50,000		
		16.	Khlor Bebas (Cl2)	Sampel	75,000		
		17.	Flourida (F)	Sampel	75,000		
		18.	Kesadahan Total CaCO3	Sampel	75,000		
		19.	Kesadahan Mg	Sampel	75,000		
		20.	Kesadahan Ca	Sampel	75,000		
		21.	Kalsium (Ca)	Sampel	75,000		
		22.	Kadmium (Cd)	Sampel	75,000		
		23.	Timbal (Pb)	Sampel	75,000		
		24.	Besi (Fe)	Sampel	75,000		

1	2				3	4
		25.	Mangan (Mn)	Sampel	75,000	
		26.	Tembaga (Cu)	Sampel	75,000	
		27.	Krom Total (Cr)	Sampel	75,000	
		28.	Krom Heksavalen (Cr 6+)	Sampel	75,000	
		29.	Seng (Zn)	Sampel	75,000	
		30.	Nikel (Ni)	Sampel	75,000	
		31.	Alumunium (Al)	Sampel	75,000	
		32.	Magnesium (Mg)	Sampel	75,000	
		33.	Kalium (K)	Sampel	75,000	
		34.	Air Raksa (Hg)	Sampel	35,000	
		35.	Barium (Ba)	Sampel	75,000	
		36.	Kobalt (Co)	Sampel	75,000	
		37.	Perak (Ag)	Sampel	75,000	
		38.	Arsen (As)	Sampel	75,000	
		39.	Boron (B)	Sampel	75,000	
		40.	Selenium (Se)	Sampel	75,000	
		41.	Timah (Sn)	Sampel	75,000	
		42.	Antimon (Sb)	Sampel	75,000	
		43.	Nitrogen Organik (N)	Sampel	75,000	
		44.	N Total	Sampel	75,000	
		45.	Zat Organik	Sampel	75,000	
		46.	TOC	Sampel	25,000	
	III	Mikrobiologi				
		1.	MPN (*Most Probable Number*) Fecal Coli	Sampel	75,000	
		2.	MPN Total Coli	Sampel	75,000	
		3.	E. Coli	Sampel	75,000	
	IV	Biota				
		1.	Bentos	Sampel	50,000	
		2.	Necton	Sampel	50,000	
		3.	Plankton	Sampel	50,000	
	B	ANALISA UDARA AMBIEN DAN EMISI				
	I	Udara Ambien				

1	2				3	4
		1.	Paket (max. 7 parameter)	Paket	1,250,000	
			a. CO			
			b. Pb			
			c. NOx			
			d. SOx			
			e. Partikulat (TSP)			
			f. NH3			
			g. Oksidan (O3)			
		2.	Paket Tambahan			
			a. H2S	Sampel	200,000	
			b. PM10	Sampel	200,000	
			c. PM2.5	Sampel	200,000	
			d. Kebisingan Sesaat	Sampel	75,000	
			e. Kebisingan 24 jam	Sampel	650,000	
	II	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak				
		1.	Boiler (max. 6 parameter)	Paket	2,300,000	
			a. Partikulat			
			b. SO2			
			c. NO2			
			d. NH3			
			e. CO			
			f. Opasitas			
		2.	Genset (max. 12 parameter)	Paket	2,800,000	
			a. Partikulat			
			b. SO2			
			c. NO2			
			d. CO			
			e. NH3			
			f. Opasitas			
			g. C12			
			h. HF			
			i. H2S			

1	2				3	4
			j. Cd			
			k. Zn			
			l. Pb			
			Pengujian di luar paket (Per parameter)	Parameter	250,000	
	III	Udara Emisi Sumber Bergerak				
		1.	Paket (max. 4 parameter	Paket	2,300,000	
			a. CO			
			b. CO2			
			c. NOx			
			d. Opasitas			
	C	ANALISA TANAH				
	I	Tanah dan Sedimen				
		1.	C-Organik	Sampel	160,000	
		2.	P Bray	Sampel	160,000	
		3.	N Total	Sampel	200,000	
		4.	pH H2O	Sampel	60,000	
		5.	pH KCL	Sampel	60,000	
		6.	Kalsium (Ca)	Sampel	150,000	
		7.	Magnesium (Mg)	Sampel	150,000	
		8.	Kalium (K)	Sampel	140,000	
		9.	Natrium (Na)	Sampel	140,000	
		10.	Timbal (Pb)	Sampel	300,000	
		11.	Kadmium (Cd)	Sampel	300,000	
		12.	Tembaga (Cu)	Sampel	250,000	
		13.	Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	200,000	
		14.	Minyak dan Lemak	Sampel	350,000	
		15.	TPH (*Total Poly Hydrocarbon*)	Sampel	600,000	
66.	b. Tarif Pelaksanaan Sampling Kualitas Lingkungan Hidup					

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Titik Sampling
1	Sampling air/air limbah	

1	2			3	4
			a. Dalam kota	250,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	450,000	
		2	Sampling udara ambien		
			a. Dalam kota	1,400,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	1,800,000	
		3	Sampling emisi sumber bergerak		
			a. Dalam kota	500,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	60,000	
		4	Sampling emisi sumber tidak bergerak		
			a. Dalam kota	1,000,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	1,500,000	
		NO	**JENIS KEGIATAN**	**HARGA (Rp)/Paket**	
		5	Sampling air/air limbah + udara ambien		
			a. Dalam kota	1,550,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	2,250,000	
		6	Sampling air/air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak		
			a. Dalam kota	2,500,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	2,700,000	
		7	Sampling air/air limbah + udara ambien + emisi sumber tidak bergerak		
			a. Dalam kota	2,600,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	3,500,000	
		8	Sampling air/air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak		
			a. Dalam kota	3,000,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	4,200,000	
		9	Sampling air/air limbah + emisi sumber bergerak		
			a. Dalam kota	800,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	1,000,000	

1	2			3	4
		10	Sampling air/air limbah + emisi sumber tidak bergerak		
			a. Dalam kota	1,200,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	1,850,000	
		NO	**JENIS KEGIATAN**	**HARGA (Rp)/Hari/Tim**	
		11	Sampling air/air limbah + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak		
			a. Dalam kota	1,700,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	2,500,000	
		12	Sampling udara ambien + emisi sumber bergerak		
			a. Dalam kota	1,900,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	2,400,000	
		13	Sampling udara ambien + emisi sumber tidak bergerak		
			a. Dalam kota	2,300,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	3,100,000	
		14	Sampling udara ambien + emisi sumber bergerak dan tidak bergerak		
			a. Dalam kota	2,800,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	3,800,000	
		15	Sampling emisi sumber bergerak dan tidak bergerak		
			a. Dalam kota	1,400,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	2,000,000	
		16	Sampling tanah		
			a. Dalam kota	500,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	1,500,000	
		17	Sampling air + air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak + tanah		
			a. Dalam kota	3,500,000	
			b. Luar kota dalam provinsi	5,500,000	

1	2	3	4
67.		TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH. 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan: a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa; b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang miliki daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.	
68.	LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	
	~~A. RETRIBUSI PERIZINAN~~ BANGUNAN GEDUNG	I. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	
	I. Komponen retribusi dan biaya	A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:	
69.	~~A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung~~ $Nilai\ retribusi\ (Nr) = LLt\ x\ (Ilo\ x\ SHST)\ x\ It\ x\ Ibg$ $LLt = \Sigma\ (LLi\ x\ LBi)$ $It = If\ x\ \Sigma(bp\ x\ Ip)\ x\ Fm$ ~~LLt : Luas Total Lantai.~~	1) Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg 2) prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: V x I x Ibg x HSpbg	a. Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023, serta PP No. 16 Tahun 2021. b. Rumusan struktur dan tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung diperbaiki agar lebih sistematis. c. Besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Perda PDRD. Untuk selanjutnya, SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021.

1	2	3	4
	~~SHST~~ : ~~Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) tahun berjalan.~~ ~~Ilo~~ : ~~Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.~~ ~~It~~ : ~~Indeks Terintegrasi.~~ ~~Ibg~~ : ~~Indeks BG Terbangun.~~ ~~LLi~~ : ~~Luas Lantai ke-i.~~ ~~LBi~~ : ~~Luas Basemen ke-i.~~ ~~If~~ : ~~Indeks Fungsi.~~ ~~bp~~ : ~~Bobot Parameter.~~ ~~Ip~~ : ~~Indeks Parameter.~~ ~~Fm~~ : ~~Faktor kepemilikan.~~	3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$ B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp.....,-/m2 C. Indeks Lokalitas (Ilo) Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar ...% (...persen) (paling tinggi 0,5%). Atau: Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:	d. Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) seyogianya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha didaerah serta penetapan SHST oleh Pemda sekitarnya. e. Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retrbusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP No. 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan daerah.
70.	~~B. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung~~ $Nilai\ retribusi\ (Nr) = V \times I \times Ibg \times HSpbg$ ~~V~~ : ~~Volume.~~ ~~I~~ : ~~Indeks prasarana Bangunan Gedung.~~ ~~Ibg~~ : ~~Indeks BG terbangun.~~ ~~HSpbg~~ : ~~Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung.~~	Indeks Lokalitas (Ilo) (Contoh) Fungsi Bangunan / Keterangan / Indeks Lokalitas: Jalan Nasional; Jalan Provinsi; Jalan Kabupaten; Jalan Lingkungan Hunian — Sederhana — 0,5 — 0,5 — 0,5 — 0,4 Hunian — Tidak Sederhana — 0,5 — 0,5 — 0,5 — 0,4 Usaha — Mikro — 0,4 — 0,4 — 0,4 — 0,3 Usaha — Non Mikro — 0,5 — 0,5 — 0,5 — 0,5 Sosial Budaya — PAUD s/d SLTA — 0,1 — 0,1 — 0,1 — 0,1 Sosial Budaya — Perguruan tinggi — 0,2 — 0,2 — 0,2 — 0,2 Sosial Budaya — 0,3 — 0,3 — 0,3 — 0,3 Khusus — 0,5 — 0,5 — 0,5 — 0,5	
71.	II. Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung Tabel Indeks Terintegrasi (It) Fungsi / Indeks Fungsi / Klasifikasi / Bobot Parameter / Parameter / Indeks Parameter Usaha — 0,7 — Kompleksitas — 0,3 — a. Sederhana — 1 2	D. Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung Tabel Indeks Terintegrasi (It) Tetap.	

1	2						3	4
					b. Tidak sederhana			
	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2		
	Hunian		Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai		
	a. <100 m² dan <2 lantai	0,15						
	b. >100 m² dan >2 lantai	0,17						
	Keagamaan	0						
	Fungsi Khusus	1						
	Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) :		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1		
	Ganda/ Campuran							
	a. Luas <500 m² dan <2 lantai	0,6						
	b. Luas >500 m² dan >2 lantai	0,8						
72.	Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg) Jenis Pembangunan — Indeks BG Terbangun Bangunan Baru — 1 Rehabilitasi/Renovasi BG — a. Sedang — 0,45 x 50% = 0,225 b. Berat — 0,65 x 50% = 0,325 Pelestarian/Pemugaran — a. Pratama — 0,65 x 50% = 0,325 b. Madya — 0,45 x 50% = 0,225 c. Utama — 0,30 x 50% = 0,150						E. Indeks BG Terbangun (Ibg) Tetap.	

1	2	3	4
73.	Tabel Koefisien Jumlah Lantai (see table below)	F. Koefisien Jumlah Lantai Tabel Koefisien Jumlah Lantai (see table below)	Koefisien jumlah Lantai ke-26 pada Tabel Koefisien Jumlah Lantai agar diperbaiki. Pada bagian keterangan rumus Koefisien Ketinggian Gedung agar dilengkapi dengan kata "Keterangan:

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	22	1,584	47	1,807
Basemen 3 lapis	1,393	23	1,597	48	1,813
Basemen 2 lapis	1,299	24	1,61	49	1,818
Basemen 1 lapis	1,197	25	1,622	50	1,823
1	1	26	~~1,34~~ 1,634	51	1,828
2	1,090	27	1,645	52	1,833
3	1,120	28	1,656	53	1,837
4	1,135	29	1,666	54	1,841
5	1,162	30	1,676	55	1,845
6	1,197	31	1,686	56	1,849
7	1,236	32	1,695	57	1,853
8	1,265	33	1,704	58	1,856
9	1,299	34	1,713	59	1,859
10	1,333	35	1,722	60	1,862
11	1,364	36	1,73	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
12	1,393	37	1,738		
13	1,420	38	1,746		
14	1,445	39	1,754		
15	1,468	40	1,761		
16	1,489	41	1,768		
17	1,508	42	1,775		
18	1,525	43	1,782		
19	1,541	44	1,789		
20	1,556	45	1,795		
21	1,57	46	1,801		

Keterangan:
- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 (nol koma satu) setiap lapisnya.
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 (nol koma nol nol tiga) setiap lantainya

Keterangan:
- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 (nol koma satu) setiap lapisnya.
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 (nol koma nol nol tiga) setiap lantainya

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td></td><td>

$$Koefisien\ Ketinggian\ BG = \frac{(\Sigma(LLi \times KL) + \Sigma(LBi \times KB))}{(\Sigma(LLi + \Sigma LBI)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

</td><td>

$$Koefisien\ Ketinggian\ BG = \frac{(\Sigma(LLi \times KL) + \Sigma(LBi \times KB))}{(\Sigma(LLi + \Sigma LBI)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

</td><td></td></tr>
<tr><td>74.</td><td>

III. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PRASARANA</th><th rowspan="2">BANGUNAN</th><th rowspan="2">~~SATUAN~~</th><th>PEMBANGUNAN BARU</th><th>RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG</th><th>~~RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG~~</th></tr>
<tr><td>Indeks</td><td>Indeks</td><td>~~Indeks~~</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>1.</td><td rowspan="3">Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman</td><td>Pagar</td><td>m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50%</td><td>~~0,45 x 50%~~</td></tr>
<tr><td>Tanggul/retaining wall</td><td>m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50%</td><td>~~0,45 x 50%~~</td></tr>
<tr><td>Turap batas kaveling/persil</td><td>m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50%</td><td>~~0,45 x 50%~~</td></tr>
<tr><td>2.</td><td rowspan="2">Konstruksi penanda masuk lokasi</td><td>Gapura</td><td>m²</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50%</td><td>~~0,45 x 50%~~</td></tr>
<tr><td>Gerbang</td><td>m²</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50%</td><td>~~0,45 x 50%~~</td></tr>
<tr><td>3.</td><td rowspan="3">Konstruksi perkerasan</td><td>Jalan</td><td>m²</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50%</td><td>~~0,45 x 50%~~</td></tr>
<tr><td>Lapangan Upacara</td><td>m²</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50%</td><td>~~0,45 x 50%~~</td></tr>
<tr><td>Lapangan olahraga terbuka</td><td>m²</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50%</td><td>~~0,45 x 50%~~</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Konstruksi perkerasan</td><td></td><td>m²</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50%</td><td>~~0,45 x 50%~~</td></tr>
</table>

</td><td>

III. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana Indeks Prasarana Bangunan Gedung

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PRASARANA</th><th rowspan="2">BANGUNAN</th><th rowspan="2">Hspbg (Rp)</th><th>PEMBANGUNAN BARU</th><th>RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG</th></tr>
<tr><td>Indeks</td><td>Indeks</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1.</td><td rowspan="3">Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman</td><td>Pagar</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>Tanggul/ retaining wall</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>Turap batas kaveling/ persil</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>2.</td><td rowspan="2">Konstruksi penanda masuk lokasi</td><td>Gapura</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>Gerbang</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>3.</td><td rowspan="3">Konstruksi perkerasan</td><td>Jalan</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>Lapangan Upacara</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>Lapangan olahraga terbuka</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Konstruksi perkerasan aspal, beton</td><td rowspan="2"></td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Konstruksi Perekerasan grassblock</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>6.</td><td></td><td>Jembatan</td><td>..... /m¹</td><td>1,00</td><td>0,65 x 50% = 0, 325</td></tr>
</table>

</td><td>

a. Besaran Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Perda PDRD. Untuk selanjutnya, HSpbg ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati. sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021.

b. Penetapan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) seyogianya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha didaerah serta penetapan HSpbg oleh Pemda sekitarnya.

</td></tr>
</table>

1	2						3						4
	aspal, beton							Konstruksi penghubung	*Box culvert*	.... /m¹	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	5.	Konstruksi Perekerasan *grassblock*		m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		.... /m¹	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	~~*7*~~	8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang)		.... /m¹	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/*underpass*)		.... /m¹	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
			Box culvert	m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	10.	Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah	Kolam renang	.... /m¹	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~			Kolam pengolahan air reservoir bawah tanah	.... /m¹	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang)		m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	11.	Konstruksi *septic tank*, sumur resapan		.... /m¹	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/*underpass*)		m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	.... /Per 5 m²	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	10.	Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah	Kolam renang	m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~			cerobong	.... /Per 5 m²	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
			Kolam pengolahan air reservoir bawah tanah	m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	12.a	Konstruki menara air		.... /Per 5 m²	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	11.	Konstruksi *septic tank*, sumur resapan		m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	13.	Konstruksi monumen	Tugu	.... /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~			Patung	.... /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
			cerobong	Per 5 m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~			Di dalam persil	.... /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	12.a	Konstruki menara air		Per 5 m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~			Di luar persil	.... /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
	13.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	14.	Konstruksi intalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	.... /Unit (Luas Maksimum 10 m², apabila ada penambahan Luas unit dikenakan	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
			Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~							

1	2						3					4
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~				Biaya Tambahan/m²		
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~			Instalasi Telepon Komunikasi	..../Unit (Luas Maksimum 10 m², apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m²	1,00	0,65 x 50% = 0, 325
14.	Konstruksi intalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (Luas Maksimum 10 m², apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~			Instalasi pengolahan	..../Unit (Luas Maksimum 10 m², apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m²	1,00	0,65 x 50% = 0, 325
		Instalasi Telepon Komunikasi	Unit (Luas Maksimum 10 m², apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	15.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard Papan iklan	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325
		Instalasi pengolahan	Unit (Luas Maksimum 10 m², apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m²	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~			Papan nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	~~*7*~~	16.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		..../Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0, 325
15.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard Papan iklan	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	17.	Konstruksi menara televisi		..../Unit (Tinggi Maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, maka dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0, 325
		Papan nama (Berdiri sendiri atau berupa	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~	18.	Konstruksi antena radio				
									Ketinggian 25-50 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325

1	2						3					4
		tembok pagar)										
16.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
17.	Konstruksi menara televisi		Unit (Tinggi Maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, maka dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
18.	Konstruksi antena radio											
	1. Standing tower dengan konstruksi 3 – 4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
		Ketinggian >150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
	2. Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
		Ketinggian >100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	~~*7*~~						
19.	Konstruksi antena (*tower*						1. Standing tower dengan konstruksi 3 – 4 kaki	Ketinggian 51-75 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								Ketinggian 76-100 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								Ketinggian 101-125 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								Ketinggian 126-150 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								Ketinggian >150 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
							2. Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								Ketinggian 51-75 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								Ketinggian 76-100 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								Ketinggian >100 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
							19. Konstruksi antena (*tower* telekomunikasi)					
								Menara bersama				
								a. Tinggi kurang dari 25 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								b. Tinggi 25-50 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								c. Tinggi lebih dari 50 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								Menara mandiri				
								d. Tinggi kurang dari 25 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
									..../Unit			
								e. Tinggi 25-50 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
								f. Tinggi lebih dari 50 m	..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
							20. Tangki tanam bahan bakar		..../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
							21.					
								Saluran	..../m^1	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	

1	2						3					4
		telekomunikasi)						Pekerjaan drainase (dalam persil)	Kolam tampung	..../m²	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
			Menara bersama				22.	Konstruksi penyimpanan/silo		..../m³	1,00	0,65 x 50% = 0, 325	
			a. Tinggi kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
			b. Tinggi 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
			c. Tinggi lebih dari 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
			Menara mandiri										
			a. Tinggi kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
			b. Tinggi 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
			c. Tinggi lebih dari 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
	20.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
	21.	Pekerjaan drainase (dalam persil)											
			Saluran	m^1	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
			Kolam tampung	m^2	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
	22.	Konstruksi penyimpanan/silo		m^3	1,00	0,65 x 50%	~~0,45 x 50%~~						
75.	~~IV. Harga Satuan atau Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung~~ ~~Harga Satuan atau tarif retribusi Prasarana Bangunan Gedung, ditetapkan sebagai berikut:~~ ~~No.~~ | ~~Jenis Bangunan~~ | ~~Satuan~~ | ~~Harga Retribusi~~ ~~1~~ | ~~2~~ | ~~3~~ | ~~4~~						Dihapus.						

1	2				3	4
	1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman				
		a. Pagar	m¹	Rp. 5.000,-		
		b. Tanggul/*retaning wall*	m¹	Rp. 5.000,-		
		c. Turap batas kavling/persil	m¹	Rp. 5.000,-		
	2.	Konstruksi penanda masuk lokasi				
		a. Gapura	m²	Rp. 50.000,-		
		b. Gerbang	m²	Rp. 50.000,-		
	3.	Konstruksi perkerasan				
		a. Jalan	m²	Rp. 2.000,-		
		b. lapangan upacara	m²	Rp. 2.000,-		
		c. Lapangan olahraga terbuka	m²	Rp. 2.000,-		
	4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m²	Rp. 2.000,-		
	5.	Konstruksi perkerasan *grassblok*	m²	Rp. 1.000,-		
	6.	Konstruksi penghubung				
		a. Jembatan	m²	Rp. 3.000,-		
		b. *Box culvert*	m²	Rp. 3.000,-		
		1) Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m²	Rp. 3.000,-		
		2) Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	m²	Rp. 2.000,-		
		3) Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m²	Rp. 2.000,-		
	7.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah				
		a. Kolam Renang	m²	Rp. 10.000,-		
		b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m²	Rp. 5.000,-		
	8.	Konstruksi Septic tank/ sumur resapan	m²	Rp. 10.000,-		
	9.	a. Konstruksi Menara				
		1) Menara *reservoir*	5 m²	Rp. 350.000,-		
		2) cerobong	5 m²	Rp. 350.000,-		
		b. Konstruksi menara air	5 m²	Rp. 500.000,-		
	10.	Konstruksi Monumen				
		a. Tugu	Unit	Rp. 500.000,-		
		b. Patung	Unit	Rp. 500.000,-		
		c. Di dalam persil	Unit	Rp. 500.000,-		
	1	2	3	4		

1	2				3	4
		d. Di luar persil	Unit	Rp. 500.000,-		
	11.	Konstruksi Instalasi/ gardu listrik				
		a. Instalasi Listrik				
		1) Luas maksimum 10 m²	Unit	Rp. 300.000,-		
		2) Biaya tambahan (di atas 10 m²)	m²	Rp. 3.000,-		
		b. Instalasi telepon/ komunikasi				
		1) Luas maksimum 10 m²	Unit	Rp. 200.000,-		
		2) Biaya tambahan (di atas 10 m²)	m²	Rp. 2.000,-		
		c. Instalasi pengolahan				
		1) Luas maksimum 10 m²	Unit	Rp. 200.000,-		
		2) Biaya tambahan (di atas 10 m²)	m²	Rp. 2.000,-		
	12.	Konstruksi reklame/papan nama				
		a. Billboard papan iklan	Unit	Rp. 2.500.000,-		
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit	Rp. 750.000,-		
	13.	Pondasi Mesin (di luar bangunan)	Unit Mesin	Rp. 3.500.000,-		
	14.	Konstruksi Menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, maka dihitung kelipatannya	Rp. 10.000.000,-		
	15.	Konstruksi antena radio				
		I. Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki				
		a. Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 5.000.000,-		
		b. Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 7.500.000,-		
		c. Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 10.000.000,-		
		d. Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp. 12.500.000,-		
		e. Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp. 15.000.000,-		
		f. Ketinggian > 150 m	Unit	Rp. 20.000.000,-		
		II. Sistem guy wire/bentang kawat				
		a. Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp. 5.000.000,-		
		b. Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 7.500.000,-		
		c. Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 10.000.000,-		
		d. Ketinggian di atas 100 m	Unit	Rp. 15.000.000,-		
	16.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)				

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>~~Menara Bersama~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>~~a. Ketinggian < 25 meter~~</td><td>~~Unit~~</td><td>~~Rp. 15.000.000,-~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~b. Ketinggian 25-50~~</td><td>~~Unit~~</td><td>~~Rp. 30.000.000,-~~</td></tr>
<tr><td>~~1~~</td><td>~~2~~</td><td>~~3~~</td><td>~~4~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~c. Ketinggian >50 meter~~</td><td>~~Unit~~</td><td>~~Rp. 45.000.000,-~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~Menara mandiri~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>~~a. Ketinggian < 25 meter~~</td><td>~~Unit~~</td><td>~~Rp. 12.500.000,-~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~b. Ketinggian 25-50~~</td><td>~~Unit~~</td><td>~~Rp. 25.000.000,-~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~c. Ketinggian >50 meter~~</td><td>~~Unit~~</td><td>~~Rp. 37.500.000,-~~</td></tr>
<tr><td>~~17.~~</td><td>~~Tanki tanam bahan bakar~~</td><td>~~Unit~~</td><td>~~Rp. 10.000.000,-~~</td></tr>
<tr><td>~~18.~~</td><td>~~Pekerjaan drainase~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>~~a. saluran air~~</td><td>~~m¹~~</td><td>~~Rp. 1.100,-~~</td></tr>
<tr><td></td><td>~~b. Penampung~~</td><td>~~m²~~</td><td>~~Rp. 1.100,-~~</td></tr>
<tr><td>~~10.~~</td><td>~~Konstruksi penyimpanan (silo)~~</td><td>~~m³~~</td><td>~~Rp. 250.000,-~~</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>76.</td><td>] B. ~~RETRIBUSI~~ TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
<table>
<tr><th>No</th><th>~~Penggunaan Tenaga Kerja Asing~~</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>~~Dana~~ Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ~~Dalam Kabupaten~~</td><td>US$ 100</td><td>~~Tarif dikali dengan Kurs Rupiah saat terjadinya pembayaran~~</td></tr>
</table>
</td><td>II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Layanan</th><th>Tarif</th><th>Satuan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah</td><td>US$ 100</td><td>Per jabatan per orang/ bulan</td><td>Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD</td></tr>
</table>
</td><td>Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023, serta PP No. 34 Tahun 2021</td></tr>
</table>

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI